



# RENCANA STRATEGIS

**Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta**

**Tahun 2025 - 2029**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang disusun ini diharapkan dapat mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mempunyai acuan umum tentang arah dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya kedepan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra ini, semoga Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini bermanfaat.

Jakarta, 30 September 2025

Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta,



Augustinus, S.E., M.M  
NIP 197908052008011010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I

DAFTAR ISI ..... II

DAFTAR TABEL..... III

DAFTAR GAMBAR .....IV

DAFTAR LAMPIRAN..... V

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

    I.1 Latar Belakang ..... 1

    I.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... 2

    I.3 Maksud dan Tujuan..... 3

    I.4 Sistematika Penulisan ..... 4

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD ..... 5**

    II.1 Gambaran Pelayanan ..... 5

        II.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi..... 6

        II.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta..... 10

        II.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta..... 17

        II.1.4 Kelompok Sasaran Layanan ..... 30

    II.2 Permasalahan dan Isu Strategis ..... 36

        II.2.1 Permasalahan Pelayanan ..... 38

        II.2.2 Isu Strategis ..... 39

    II.3 Reviu RPJMN dan Renstra K/L yang Terkait dengan Sekretariat DPRD .. 43

        II.3.1 Prioritas Nasional Terkait Demokrasi dan Tata Kelola ..... 43

        II.3.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Peran Sekretariat DPRD ... 44

        II.3.3 Kondisi Indeks Demokrasi di DKI Jakarta..... 45

        II.3.4 Implikasi bagi Renstra Sekretariat DPRD DKI Jakarta 2025–2029 46

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 50**

    III.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-  
        2029..... 50

    III.2 Strategi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 ..... 56

    III.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 59

    III.4 Penyusunan Pohon Kinerja Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun  
        2025-2029..... 62

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 67**

**BAB V PENUTUP..... 88**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1    Komposisi Tenaga PJLP Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta per Agustus 2025 ..... 12

Tabel 2.2    Komposisi Tenaga Ahli (TA) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta per 1 September 2025 ..... 14

Tabel 2.3    Sarana dan Prasarana kantor Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta ..... 15

Tabel 2.4    Capaian kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja sasaran periode 2020-2024 ..... 19

Tabel 2.5    Capaian kinerja Sasaran Khusus dan indikator kinerja sasaran periode 2020-2024 ..... 23

Tabel 2.6    Capaian Kinerja Sasaran Operasional dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020-2024 ..... 27

Tabel 2.7    Kinerja Layanan Hubungan Strategis Antar-Lembaga Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta (2020–2024) ..... 34

Tabel 2.8    Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD ..... 40

Tabel 3.1    Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja RPJMD 2025-2030 ..... 52

Tabel 3.2    Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ..... 56

Tabel 3.3    Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ..... 57

Tabel 3.4    Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ..... 60

Tabel 3.5    Merumuskan Tujuan Renstra PD Sekretariat DPRD Berdasarkan Isu Strategis ..... 63

Tabel 3.6    Merumuskan Sasaran Renstra Berdasarkan *Critical Success Factors* (CSF) Tujuan Renstra ..... 64

Tabel 3.7    Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra ..... 65

Tabel 4.1    Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Sekretariat DPRD ..... 68

Tabel 4.2    Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ..... 79

Tabel 4.3    Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta ..... 86

Tabel 4.4    Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta ..... 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD..... 8

Gambar 2.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta per 1 September 2025 ..... 11

Gambar 2.3 Layanan Ramah Kaum Rentan di Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta..... 16

Gambar 2.4 Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat DPRD ..... 21

Gambar 2.5 Grafik Kinerja Anggaran Tahun 2021-2024 ..... 29

Gambar 2.6 Komposisi Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Setiap AKD Periode 2024-2029 ..... 31

Gambar 2.7 Komposisi Jumlah Anggota Badan Musyawarah Berdasarkan Fraksi ..... 31

Gambar 2.8 Komposisi Jumlah Anggota Badan Pembentukan Perda Berdasarkan Fraksi ..... 32

Gambar 2.9 Komposisi Jumlah Anggota Badan Anggaran Berdasarkan Fraksi . 32

Gambar 2.10 Komposisi Jumlah Anggota Badan Kehormatan Berdasarkan Fraksi ..... 33

Gambar 2.11 Sebaran Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Pada Masing-Masing Komisi (A, B, C, D, E) ..... 33

Gambar 2.12 Grafik Perolehan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 ..... 47



# BAB I

## Pendahuluan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

**P**enyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan sebuah kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Renstra ini menjadi pedoman penting untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mendukung DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai aktivitas utamanya.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh kewajiban yang tercantum dalam regulasi nasional dan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan kebijakan strategis nasional.

Secara strategis, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai dokumen acuan dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan operasional dengan visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta. Hal ini bertujuan memastikan tercapainya keselarasan antara agenda daerah dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pencapaian target Peta Jalan Jakarta menuju posisi 20 besar Kota Global Dunia. Lebih lanjut, Renstra ini juga dimaksudkan untuk mengatur arah kebijakan yang mendukung tugas-tugas utama DPRD, khususnya dalam pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD secara maksimal.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta perangkat daerah lainnya. Hal tersebut pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan,

meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif daerah.

## **I.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2022-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103, Noreg Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (7-262/2024));
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104, Noreg Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta (8-317/2024));
12. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia; dan
13. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah strategis dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Adapun tujuan Renstra ini adalah:

1. Menyediakan acuan yang komprehensif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional;
2. Memastikan keselarasan dan integrasi antara perencanaan Sekretariat DPRD dengan agenda pembangunan daerah dan nasional;
3. Menyediakan alat ukur kinerja yang jelas, terstruktur, dan akuntabel untuk evaluasi dan monitoring kinerja organisasi.

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan Sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan dokumen.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD**

Memaparkan secara rinci gambaran umum tentang pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, permasalahan utama yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang relevan dalam periode perencanaan ini.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tujuan strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh, serta penyusunan pohon kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan secara terperinci mengenai program-program prioritas, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan, beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan selama periode Renstra.

##### **BAB V PENUTUP**

Menyajikan ringkasan kesimpulan strategis Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Bab ini juga menguraikan kaidah penting dalam pelaksanaan Renstra, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi untuk memastikan efektivitas implementasi program dan kegiatan pembangunan.

## BAB II

# Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD

**G**ambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029. Pembahasan ini mencakup penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, identifikasi permasalahan kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi internal, dan pemetaan kondisi strategis yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Analisis ini diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan langkah-langkah strategis penguatan kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun mendatang.

#### II.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kedudukan Jakarta mengalami perubahan mendasar menjadi daerah khusus dengan kewenangan lebih luas dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan daerah, termasuk aspek ekonomi, keuangan, diplomasi internasional, serta kerja sama antarwilayah dan antarnegara. Kondisi ini secara langsung meningkatkan peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan dan keputusan strategis untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing internasional.

Dalam konteks tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memegang peranan penting sebagai lembaga pendukung yang bertugas menyediakan berbagai pelayanan untuk memastikan DPRD mampu melaksanakan perannya secara efektif dan responsif terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat DPRD tidak hanya mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD, tetapi juga menjadi penghubung antara lembaga Legislatif dan Eksekutif. Pelayanan Sekretariat DPRD diselenggarakan secara terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan kelembagaan DPRD dan Eksekutif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam konteks regional maupun global.



### **II.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan yang semakin luas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan perannya sebagai lembaga representasi rakyat di daerah. Kondisi ini membawa implikasi strategis terhadap perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD, terutama terkait dukungan administratif, teknis, dan operasional yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedewanan secara efektif.

Secara formal, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, diuraikan secara rinci sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan**

- a. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- b. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- c. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah.

#### **2. Tugas**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD.

#### **3. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sekretariat DPRD;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat DPRD;

- d. penyelenggaraan kesekretariatan DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- f. fasilitasi rapat anggota DPRD;
- g. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- h. fasilitasi pengangkatan, pelantikan, pemberhentian dalam dan dari jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta serah terima jabatan pada rapat paripurna DPRD;
- i. fasilitasi pelantikan, penggantian antar waktu, dan purna bakti anggota DPRD;
- j. pengelolaan Kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Sekretariat DPRD;
- k. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Sekretariat DPRD;
- l. pengelolaan Kepegawaian, keuangan, dan barang Sekretariat DPRD;
- m. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Sekretariat DPRD;
- n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; dan
- o. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

#### **4. Struktur Organisasi**

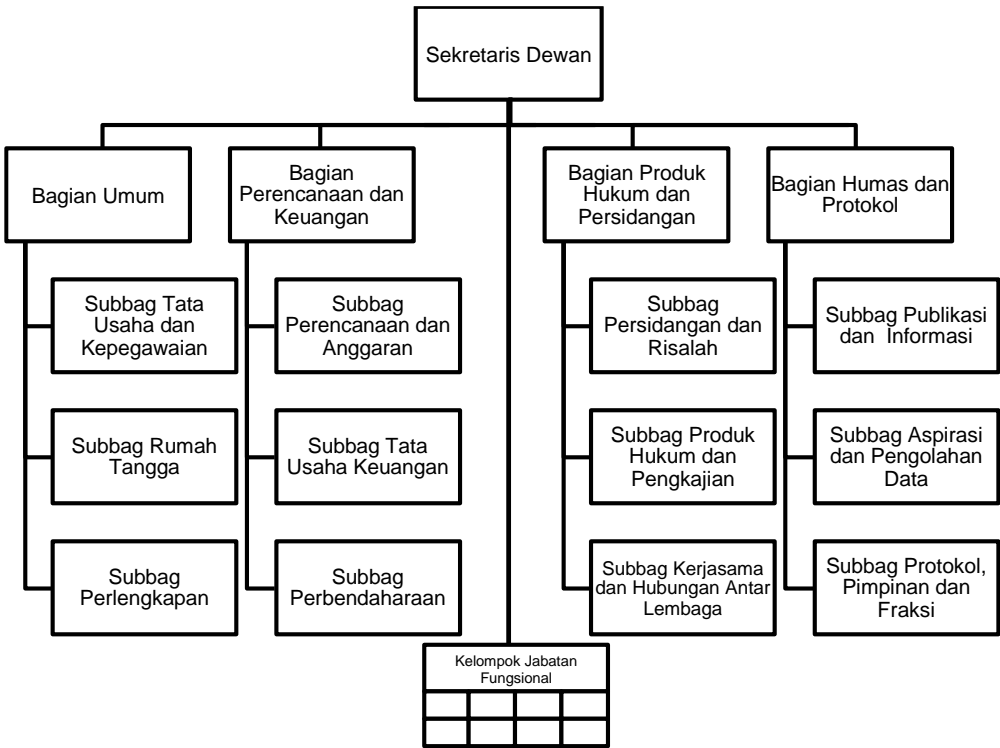
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta secara efektif, Sekretariat DPRD didukung oleh struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang kompleks dan dinamis. Struktur organisasi tersebut menjadi kerangka operasional dalam memastikan berbagai pelayanan administratif dan teknis kepada DPRD berjalan secara sistematis, profesional, dan efisien dalam kondisi yang ada pada saat ini.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek kelembagaan sesuai regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan kompleksitas tugas yang dihadapi. Susunan ini mencerminkan kebutuhan internal organisasi dalam menjawab dinamika tugas DPRD.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini berlaku ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD
  2. Bagian Umum, terdiri dari:
    - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
    - b. Subbagian Rumah Tangga
    - c. Subbagian Perlengkapan
  3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
    - a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran
    - b. Subbagian Tata Usaha Keuangan
    - c. Subbagian Perbendaharaan
  4. Bagian Produk Hukum dan Persidangan, terdiri dari:
    - a. Subbagian Persidangan dan Risalah
    - b. Subbagian Produk Hukum dan Pengkajian
    - c. Subbagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
  5. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
    - a. Subbagian Publikasi dan Informasi
    - b. Subbagian Aspirasi dan Pengolahan Data
    - c. Subbagian Protokol, Pimpinan dan Fraksi
  6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berlaku saat ini disusun secara sistematis guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD secara optimal. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, terdiri dari 4 (empat) Bagian yang masing-masing memiliki sejumlah 3 (tiga) Subbagian dengan tugas serta fungsi spesifik, mencakup pengelolaan administrasi umum, keuangan, persidangan, komunikasi publik, serta diperkuat oleh adanya kelompok jabatan fungsional yang mendukung tugas-tugas khusus sesuai keahlian masing-masing.

Dalam konteks dinamika perubahan Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus yang semakin kompleks, struktur kelembagaan Sekretariat DPRD menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Tantangan tersebut mencakup perlunya spesialisasi tugas yang lebih terstruktur dan terarah, terutama terkait pengelolaan teknologi informasi, komunikasi internal yang efektif antar bagian, serta tata kelola administrasi yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan secara komprehensif melalui pengembangan kompetensi teknis, manajerial, serta keahlian khusus lainnya. Distribusi beban kerja yang lebih merata antar bagian juga menjadi aspek penting yang perlu ditinjau agar tidak terjadi ketidakseimbangan, terutama pada saat meningkatnya intensitas kegiatan DPRD.

Melihat tantangan tersebut, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta ke depan diarahkan untuk menjadi lebih adaptif, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan strategis Jakarta sebagai Kota Global. Hal ini diwujudkan melalui desain kelembagaan baru dengan distribusi beban kerja yang proporsional serta integrasi teknologi informasi yang lebih optimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, adanya wacana penambahan Bagian dan Subbagian dalam Sekretariat DPRD, sehingga menjadi 5 (lima) Bagian yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Subbagian. Penguatan Struktur Organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh diharapkan akan mampu menjawab tantangan internal maupun eksternal secara efektif.



### **II.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta**

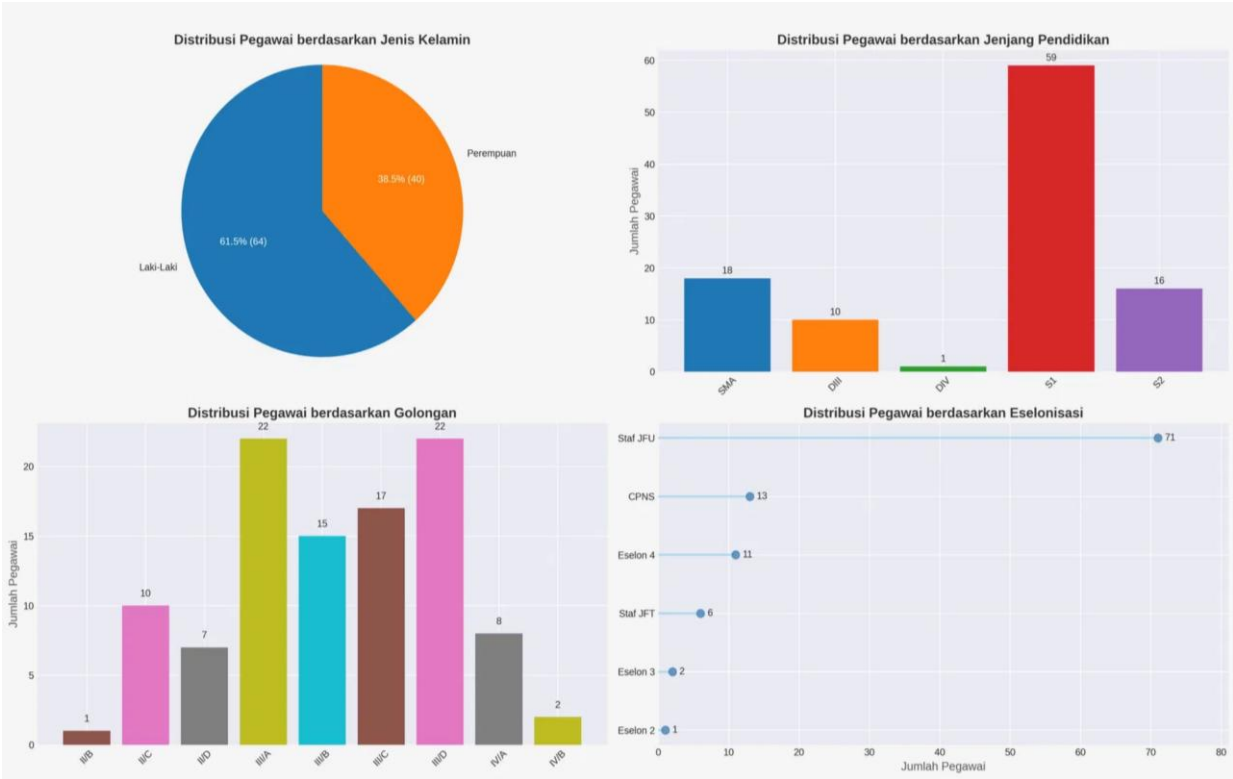
Sumber daya merupakan salah satu aspek penting yang menentukan efektivitas pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD didukung oleh berbagai sumber daya yang mencakup sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat utama dalam menunjang kelancaran aktivitas administratif dan teknis operasional DPRD dalam merespons kebutuhan DPRD yang semakin kompleks dan dinamis.

Dengan demikian, uraian lebih lanjut mengenai kondisi aktual sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sangat penting untuk mendapatkan gambaran jelas terkait kapasitas yang tersedia, sekaligus mengidentifikasi potensi peningkatan yang diperlukan di masa depan. Pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi sumber daya ini akan menjadi dasar penting dalam perencanaan strategis dan pengelolaan kelembagaan Sekretariat DPRD secara efektif selama periode Renstra 2025–2029.

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kedewanan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini salah satunya dapat tercermin melalui kondisi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Saat ini, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki sumber daya manusia yang cukup beragam dan terstruktur, mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Ahli (TA), serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau tenaga non-ASN yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi aktual SDM ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta per 1 September 2025, berikut disajikan data secara rinci dalam grafik berikut:



Gambar 2.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta per 1 September 2025

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, data diolah

Berdasarkan komposisi per 1 September 2025, Pegawai ASN Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 104 Pegawai. Adapun, dari jumlah tersebut mayoritas ASN berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 76 orang atau 73,08%. Struktur ini mencerminkan basis teknis administratif yang memadai untuk menopang operasional harian Sekretariat mulai dari penyiapan dukungan persidangan dan produk hukum hingga pengelolaan informasi, keuangan, serta layanan penunjang kelembagaan. Pada saat yang sama, Golongan IV tercatat 10 orang atau 9,62%, sehingga ketersediaan kader kepemimpinan pada tingkat strategis masih perlu diperkuat agar kapasitas pengambilan keputusan dan pengendalian mutu lintas proses tetap terjaga seiring meningkatnya kompleksitas tugas.

Dari sisi kualifikasi, proporsi Pegawai dengan jenjang Pendidikan S1 dan S2 mencapai 73,08%, dengan perbandingan persentase Pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 56,73%, dan berpendidikan S2 sebanyak 15,38%. Dari sisi komposisi gender, persentase Pegawai laki-laki sebanyak 61,54% dan 38,46% merupakan Pegawai perempuan.

Sejalan dengan gambaran tersebut, arah penguatan kelembagaan difokuskan pada penguatan jabatan fungsional prioritas yang menopang layanan inti Sekretariat DPRD dan program pengembangan kompetensi yang berjenjang dan terukur. Penerapan budaya kerja yang konsisten serta mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala diharapkan dapat menjadi bagian dari transformasi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Selain ASN, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta juga didukung oleh Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). PJLP memiliki tugas dalam memberikan dukungan administrasi yang melekat pada agenda pimpinan dan anggota DPRD, penjagaan keamanan gedung dan kegiatan, kebersihan gedung, hingga layanan teknis yang memastikan kesiapan sarana prasarana. Adapun komposisi tenaga PJLP atau tenaga non-ASN yang mendukung operasional harian serta tugas-tugas teknis, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Komposisi Tenaga PJLP Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta per Agustus 2025

No	Jenis PJLP	Laki-laki	Perempuan	SD	SMP	SMA / SMK	D3	S1	S2	Total
1	Caraka - Pengiriman	6	0	0	0	6	0	0	0	6
2	Petugas Administrasi - Pimpinan Dan Anggota DPRD (Penunjang Teknis)	196	91	0	0	24	1	239	23	287
3	Petugas Administrasi	127	53	0	0	151	23	6	0	180
4	Petugas Pelayanan Umum - Pramu Pimpinan (Ketua/Wakil Ketua DPRD)	6	0	0	0	4	1	1	0	6
5	Supir	13	0	1	1	9	1	1	0	13
6	Petugas Kebersihan	30	19	2	4	41	0	2	0	49
7	Petugas Keamanan	113	12	0	1	107	4	13	0	125
8	Teknisi Mekanik Dan Listrik	12	0	0	2	9	0	1	0	12
Total		503	175	3	8	351	30	263	23	678

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, data diolah

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah PJLP per Agustus 2025 tercatat sebanyak 678 orang, dengan komposisi 503 laki-laki atau 74,2% dan 175 perempuan atau 25,8%. Distribusi tugas menunjukkan konsentrasi terbesar berturut-turut pada administrasi penunjang Pimpinan/Anggota DPRD yaitu sebanyak 287 orang atau 42,3%, administrasi umum sebanyak 180 orang atau 26,6%, petugas keamanan sebanyak 125 orang atau 18,4%. Pada jenis PJLP lainnya, terdapat PJLP kebersihan sebanyak 49 orang, Supir sebanyak 13 orang, teknisi mekanik dan listrik sebanyak 12 orang, caraka sebanyak 6 orang, dan Petugas Pelayanan Umum - pramu pimpinan sebanyak 6 orang.

Dari sisi kualifikasi, komposisi pendidikan didominasi jenjang Pendidikan SMA/SMK sebanyak 351 orang atau 51,8%, jenjang pendidikan S1 sebanyak 263 orang atau 38,8%, jenjang D3 sebanyak 30 orang atau 4,4%, jenjang S2 sebanyak 8 orang atau 1,2%, serta SD/SMP sebanyak 11 orang atau 1,6%) pada porsi yang lebih kecil. Pola ini selaras dengan karakter pekerjaan yang menuntut ketelitian administrasi, respons cepat pada dinamika persidangan, serta kesiapsiagaan keamanan dan pemeliharaan fasilitas. Pada saat yang sama, keberadaan kelompok sarjana memberikan ruang percepatan standar kerja terutama untuk fungsi *front-office* administrasi DPRD, tata naskah/arsip, pelayanan informasi publik, pemeliharaan dan perawatan aset, dan dukungan teknis acara kelembagaan.

Dari komposisi tersebut, sejumlah pemahaman kelembagaan dapat dicatat. *Pertama*, dominannya klaster administrasi menandakan kekuatan pada dukungan langsung terhadap agenda kelembagaan. *Kedua*, porsi pengamanan yang besar memberikan penyangga penting terhadap kesiapsiagaan gedung dan kegiatan. *Ketiga*, sebaran pendidikan yang didominasi SMA/SMK dengan pendidikan S1 yang signifikan menggambarkan kesiapan operasional yang kuat sekaligus potensi diferensiasi peran di lini administrasi dan penunjang teknis. *Keempat*, komposisi gender yang condong ke laki-laki selaras dengan layanan keamanan dan mobilitas, sementara peran perempuan tampak lebih bermakna pada klaster administrasi.

Tantangan ke depan bagi Sekretariat DPRD adalah mengelola tenaga non-ASN ini secara lebih efektif melalui peningkatan kapasitas profesional secara terprogram. Pelatihan berkala, pengembangan keterampilan khusus terutama yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan sarana-prasarana secara modern, menjadi hal penting untuk memastikan tenaga PJLP tetap kompetitif dan relevan dengan tuntutan organisasi yang semakin kompleks dan dinamis.



Unsur SDM selanjutnya yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah Tenaga Ahli (TA), yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas baik di lingkungan DPRD maupun di internal Sekretariat DPRD. Tenaga Ahli ini terdiri dari beberapa kategori, mencakup TA Alat Kelengkapan Dewan (AKD), TA Fraksi, serta TA Sekretariat DPRD (Setwan). Untuk melihat secara rinci komposisi aktual tenaga ahli tersebut, berikut disajikan tabel kondisi TA per 1 September 2025.

Tabel 2.2 Komposisi Tenaga Ahli (TA) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Per 1 September 2025

Kategori TA	Laki-laki	Perempuan	SMA	D3	S1	S2	S3	Total
TA AKD	29	1	0	0	16	11	3	30
TA Fraksi	8	1	0	0	7	2	0	9
TA Setwan	77	28	1	7	95	2	0	105
Total	114	30	1	7	118	15	3	144

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, data diolah

Berdasarkan data aktual per April 2025, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki total 144 Tenaga Ahli (TA) yang terdiri dari TA Alat Kelengkapan Dewan (AKD), TA Fraksi, dan TA Sekretariat DPRD (Setwan). Keberadaan tenaga ahli ini merupakan dukungan substantif, tidak hanya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD seperti penyusunan peraturan daerah, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga dalam mendukung kelancaran fungsi-fungsi internal Sekretariat DPRD seperti administrasi, manajemen data, dan analisis kebijakan internal. Mayoritas tenaga ahli memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 sebanyak 118 orang, diikuti lulusan S2 sebanyak 15 orang, dan S3 sebanyak 3 orang, mencerminkan kesiapan profesional mereka dalam mendukung berbagai kebutuhan analitis dan operasional Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan, komposisi dan kondisi aktual SDM Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga PJLP, maupun Tenaga Ahli (TA), menunjukkan kesiapan kelembagaan yang cukup kuat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD. Dengan karakteristik SDM yang cukup variatif dalam hal latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman, Sekretariat DPRD memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Namun demikian, tantangan ke depan yang lebih kompleks seiring dengan perkembangan Jakarta sebagai Provinsi daerah khusus dan Kota Global, mengharuskan Sekretariat DPRD untuk lebih

optimal dalam mengelola, mendistribusikan, serta memanfaatkan seluruh SDM yang tersedia secara terarah dan proporsional.

**2. Sarana dan prasarana kantor**

Sarana dan prasarana merupakan komponen vital dalam menunjang kelancaran operasional serta pencapaian kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan terarah. Dalam konteks Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sangat menentukan efektivitas pelayanan serta dukungan administratif dan teknis terhadap tugas-tugas DPRD. Oleh karena itu, pengelolaan yang sistematis terhadap aset yang dimiliki juga perlu menjadi perhatian. Sekretariat DPRD secara berkala melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, dan perawatan aset, guna memastikan seluruh fasilitas dapat berfungsi secara optimal dan terpelihara dengan baik.

Secara rinci, kondisi sarana dan prasarana kantor Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini tergolong cukup lengkap dan berada dalam kondisi baik, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

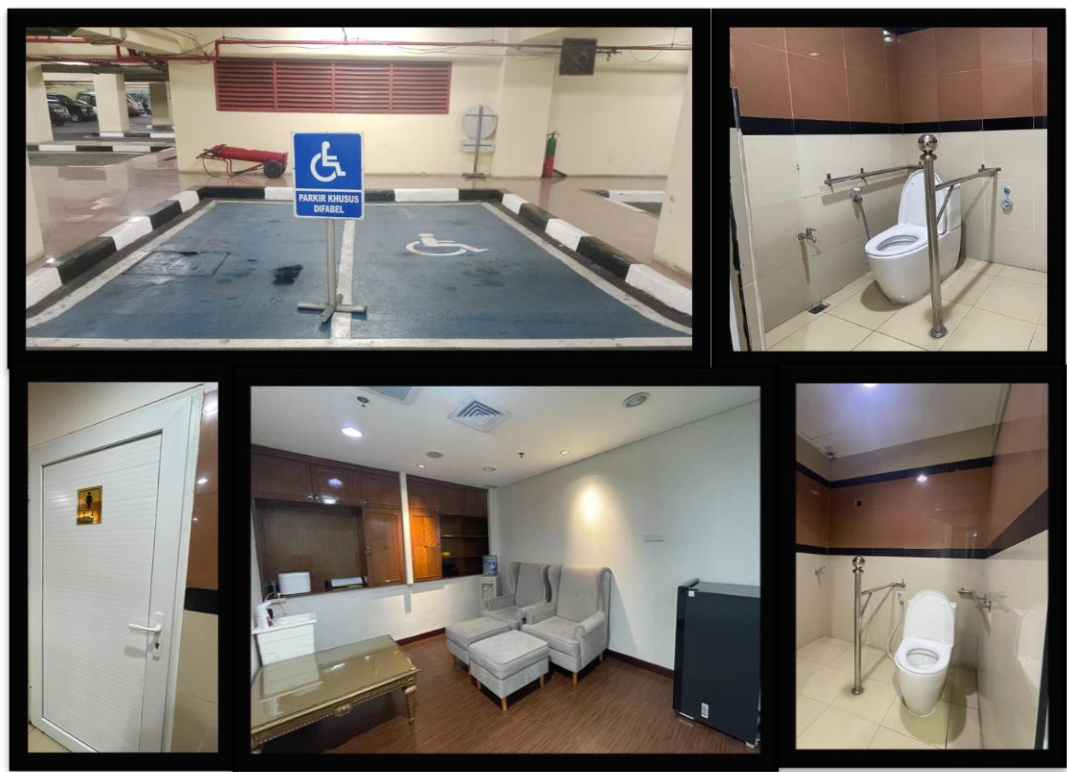
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat DPRD  
Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Rumah Negara	1	Baik
3	Kendaraan Dinas	41	Baik
4	Tablet PC dan PC Unit	619	Baik
5	Meja Kerja berbagai jenis	1.760	Baik
6	Kursi dan Sofa berbagai jenis	4.362	Baik
7	Printer	253	Baik
8	Scanner	17	Baik
9	Microphone dan Mic Conference	1.064	Baik
10	Ruang Pimpinan DPRD	5	Baik
11	Ruang Fraksi	9	Baik
12	Ruang Komisi	5	Baik
13	Perpustakaan	1	Baik

Sumber: Data BMD Sekretariat DPRD

Berdasarkan tabel tersebut, peralatan kerja, inventaris seperti komputer/PC, meja, kursi, dan fasilitas penunjang administrasi lainnya tersedia dalam jumlah mencukupi dan berfungsi optimal. Hal ini mendukung efisiensi pengolahan dokumen, penyusunan risalah, serta distribusi informasi antar-unit kerja. Kualitas peralatan yang baik juga memperkuat aspek kecepatan layanan administratif yang menjadi tulang punggung tugas Sekretariat DPRD dalam mendampingi fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Fasilitas mobilitas, termasuk kendaraan dinas dan sarana transportasi operasional, tersedia dalam jumlah memadai dan juga tercatat dalam kondisi baik. Keberadaan fasilitas ini sangat penting dalam mendukung kegiatan DPRD di dalam maupun di luar gedung, baik untuk agenda peninjauan AKD, pengawasan, hingga koordinasi lintas instansi.

Sekretariat DPRD juga turut serta berpartisipasi aktif menyediakan Layanan Ramah Kaum Rentan bagi Pegawai serta masyarakat yang datang ke Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Layanan Ramah Kaum Rentan disediakan bagi penyandang disabilitas berupa Parkir Khusus Difabel dan Toilet Khusus Difabel, serta layanan bagi Ibu menyusui berupa Ruang Laktasi khusus yang dilengkapi dengan sofa untuk menyusui, kulkas untuk menyimpan ASI dan alat sterilisasi perlengkapan menyusui.



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Gambar 2.3 Layanan Ramah Kaum Rentan di Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta

Selain infrastruktur fisik, aspek penunjang fungsional seperti perpustakaan, ruang dokumentasi, dan ruang *Podcast* turut memperkuat kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Perpustakaan dan sistem pengarsipan menjadi pusat pengetahuan legislatif yang strategis, sekaligus bagian dari transparansi informasi publik. Ketersediaan fasilitas ini memudahkan akses data, baik bagi anggota DPRD, staf, maupun masyarakat, sehingga turut mendukung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana kantor Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi standar operasional kelembagaan. Namun, dalam menghadapi transformasi Jakarta sebagai Provinsi dengan status khusus dan Kota Global/*Global City*, pengelolaan sarana prasarana tidak cukup berhenti pada ketersediaan fisik semata. Diperlukan penguatan dalam bentuk sistem pemeliharaan berbasis aset (*asset management system*), integrasi teknologi informasi dalam manajemen gedung dan ruang rapat, serta rencana investasi berkelanjutan untuk memperbarui peralatan sesuai dengan kebutuhan era digital.

### **II.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta**

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mencerminkan kapasitas organisasi dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada DPRD secara optimal. Kinerja tersebut diukur melalui sejumlah indikator yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok utama, yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional. Hal ini sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (Sekretaris DPRD) dengan Gubernur DKI Jakarta. Sasaran Strategis bertujuan memastikan bahwa peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel, dengan orientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sasaran Khusus, sebagai indikator inovasi strategis, diarahkan untuk memperkuat aspek-aspek khusus seperti implementasi kebijakan baru, peningkatan tata kelola data, serta peningkatan kualitas layanan publik secara spesifik.

Di sisi lain, Sasaran Operasional berfokus pada pencapaian target-target terukur dalam operasional rutin Sekretariat DPRD, meliputi pengelolaan keuangan, administrasi umum, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta implementasi manajemen risiko dan manajemen pengetahuan. Kombinasi dari ketiga jenis sasaran ini merupakan instrumen penting bagi organisasi untuk secara berkelanjutan mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanannya.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020–2024, berikut disajikan secara terintegrasi tabel capaian kinerja dari sasaran strategis, sasaran khusus, dan sasaran operasional. Penyajian data ini bertujuan tidak hanya untuk mengevaluasi pencapaian target selama lima tahun terakhir, tetapi juga sebagai landasan penting untuk menyusun kebijakan dan langkah strategis pada periode Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa mendatang.

**1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 2020-2024**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024 merupakan gambaran pencapaian tujuan utama organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Sasaran strategis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas pelayanan kepada DPRD, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, hingga pengembangan kapasitas kelembagaan.

Berikut disajikan tabel yang berisi target dan realisasi capaian indikator sasaran strategis selama 4 (empat) tahun terakhir, sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi serta menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.



Tabel 2.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Periode Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Anggota DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel, transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	85	N/A	91	N/A	-	-	-	-
3	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	-	-	4	4	4	4	-	-	-	-
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	-	-	91	92	91	94,06	-	-	-	-
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Persentase	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik	Persentase	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kerja Pemerintah	Persentase	-	-	100	100	100	100	-	-	-	-
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Persen	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi tata kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi	Persen	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian	Persen	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
9	Penguatan Kapasitas Legislatif dalam Meneruskan Aspirasi Masyarakat	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi	Persen	-	-	N/A	17,86	N/A	46,15	30	36,84	30	N/A
10	Peningkatan Efektivitas Layanan dan Fasilitas Lembaga Legislatif	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik	Persen	-	-	N/A	100	N/A	100	56,60	100	61,32	N/A
11	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
12	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

Sumber: LKIP Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 - 2024

Secara umum, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menunjukkan kinerja yang positif selama Periode Tahun 2020–2024. Berbagai indikator strategis menunjukkan hasil yang bahkan melebihi target awal. Hal ini mencerminkan dedikasi dan komitmen tinggi dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya. Prestasi ini juga menandakan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar berupaya menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan proaktif dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada Sasaran Strategis Penguatan Kapasitas Legislatif dalam Meneruskan Aspirasi Masyarakat dan Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Layanan dan Fasilitas Lembaga Legislatif merupakan bagian dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang datanya dirilis oleh BPS sejak tahun 2021, meskipun digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Sasaran Strategis mulai tahun 2023, sebagaimana telah termuat dalam Tabel II.43 Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II.43 Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Tahun 2020-2024							
No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Provinsi						
	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif	Persen	N/A	17,86%	46,15%	36,84%	DBR
2	Aspek Kesenjangan pada Indeks Demokrasi Provinsi						
	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan	Nilai	N/A	100	100	100	DBR
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	76,54	78,88	78,98	82,47	93,72

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Jakarta, 2025

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Gambar 2.4 Realisasi Kinerja Urusan Sekretariat DPRD

Meskipun demikian, evaluasi kinerja juga menunjukkan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait kelengkapan dan konsistensi dalam pelaporan data, seperti yang terlihat pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan implementasi tata kelola berbasis teknologi informasi (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE). Ketiadaan data realisasi (N/A) untuk beberapa indikator utama ini disebabkan karena data realisasi dari Badan Pusat Statistik

(BPS) ataupun instansi terkait yang belum rilis hingga akhir tahun kinerja. Selanjutnya, dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis di atas, tidak seluruh Sasaran Strategis dilaksanakan setiap tahun, disesuaikan dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Dengan mempertimbangkan capaian positif serta beberapa tantangan yang ditemukan, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat kapasitas organisasi melalui perbaikan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terintegrasi, konsistensi dalam realisasi indikator strategis, serta upaya peningkatan berkelanjutan dalam aspek profesionalisme aparatur dan pengelolaan anggaran. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mempertahankan capaian kinerja yang baik dan meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola organisasi secara berkelanjutan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD ke depan.

**2. Capaian Kinerja Sasaran Khusus dan Indikator Sasaran Kinerja 2020-2024**

Capaian kinerja Sasaran Khusus Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya strategis organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan spesifik yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sasaran khusus ini meliputi berbagai target yang bersifat inovatif, terukur, dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk memberikan gambaran terhadap pencapaian sasaran khusus tersebut, berikut disajikan tabel yang memuat target dan realisasi dari masing-masing indikator sasaran khusus selama lima tahun terakhir (2020–2024). Data yang tersaji dalam tabel ini digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kinerja organisasi, sekaligus menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk masa mendatang.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran Khusus dan Indikator Kinerja Sasaran Periode Tahun 2020-2024

No	Sasaran Khusus	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Uji publik rancangan peraturan daerah	Persentase uji publik atas rancangan peraturan daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-
2	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase Pemanfaatan E-Purchasing / E-Order	Persen	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	WTP	-	-	3	3	3	3	3	3	-	-
4	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	A	A	AA	AA	A	A	-	-
6	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Persen	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-

No	Sasaran Khusus	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8	Peningkatan penggunaan E-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat dan Nota Dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses/ terdisposisi	Persen	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
9	Peningkatan penggunaan e-Produk Hukum	Jumlah Perbal/ Produk Hukum yang dibuat melalui Sistem e-Perbal	Persen	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
10	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-
11	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
12	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
13	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	-	-	-	-	-	-	80	98,10	80	96,55



No	Sasaran Khusus	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
14	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
15	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
16	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
17	Tercapainya target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persen	-	-	-	-	-	-	71	97,07	71	91,2
18	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai Kualitas Data SDI	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	4
19	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

Sumber: LKIP Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 2020 - 2024

Selama periode evaluasi Tahun 2020–2024, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menunjukkan pencapaian yang baik terhadap 19 Indikator Kinerja Utama dalam kategori Sasaran Khusus. Target kinerja pada sasaran khusus ini dimulai dari tahun 2021 dengan indikator kinerja yang tidak selalu sama disetiap tahun, yang disesuaikan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam menerjemahkan strategi ke dalam hasil nyata yang berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator-indikator seperti kualitas data Satu Data Indonesia (SDI), penguatan pengelolaan aset daerah, implementasi manajemen risiko, manajemen pengetahuan, dan pemanfaatan produk dalam negeri secara konsisten menunjukkan pencapaian di atas target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa Sekretariat DPRD tidak hanya untuk mencapai target kinerja, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk melampaui ekspektasi dalam berbagai aspek.

Namun demikian, pencapaian ini juga membawa tantangan yang perlu diantisipasi secara cermat untuk menjaga kesinambungan kinerja yang telah diperoleh. Lingkungan strategis yang terus berkembang dan harapan publik yang semakin meningkat mengharuskan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk selalu siap dalam menghadapi dinamika perubahan. Untuk itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pendekatan organisasi dalam mengelola data dan informasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menerapkan praktik-praktik unggul dalam pengelolaan aset dan anggaran secara lebih efektif.

Berangkat dari hasil evaluasi ini, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu mengembangkan pendekatan strategis yang lebih terintegrasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Dalam penyusunan rencana ke depan, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu mengoptimalkan potensi yang ada dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan kapasitas internal, sehingga dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi perkembangan Provinsi DKI Jakarta.

3. Capaian Kinerja Sasaran Operasional dan Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta secara konsisten menetapkan sejumlah sasaran operasional yang terukur. Sasaran operasional ini merupakan wujud nyata komitmen Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan respons terhadap berbagai dinamika dan kebutuhan yang berkembang, baik dari internal maupun eksternal.

Berikut disajikan tabel yang mencakup capaian sasaran operasional Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan kinerja organisasi dalam menangani arahan pimpinan daerah, pengaduan masyarakat, dan rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal secara tepat waktu dan efektif.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran Operasional dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020-2024

No	Sasaran Khusus	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LKIP Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 - 2024

Target Kinerja Sasaran Operasional ditetapkan pertama kali untuk kinerja pada tahun 2021. Capaian kinerja sasaran operasional Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun terakhir mencerminkan efektivitas organisasi dalam mengelola tugas-tugas rutin dan memberikan layanan yang berkualitas. Pencapaian indikator operasional secara konsisten menggambarkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki sistem pengelolaan operasional yang matang, dengan responsivitas yang tinggi terhadap berbagai tuntutan baik dari Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, maupun masyarakat secara umum.

Dalam periode tersebut, indikator kunci yang terkait dengan implementasi kebijakan pimpinan, respons terhadap aspirasi masyarakat, dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil audit eksternal (BPK) secara konsisten mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berhasil memenuhi kewajibannya tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan layanan publik yang optimal.

Dengan mempertimbangkan capaian ini, penting bagi Sekretariat DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan internal serta menjaga kesiapan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika strategis di masa mendatang. Dalam Renstra periode 2025–2029, penguatan tata kelola organisasi yang adaptif, pengembangan budaya kerja kolaboratif, serta kesiapan sumber daya manusia yang responsif terhadap perubahan akan menjadi arah strategis utama guna memastikan pencapaian kinerja operasional yang berkelanjutan dan lebih optimal.

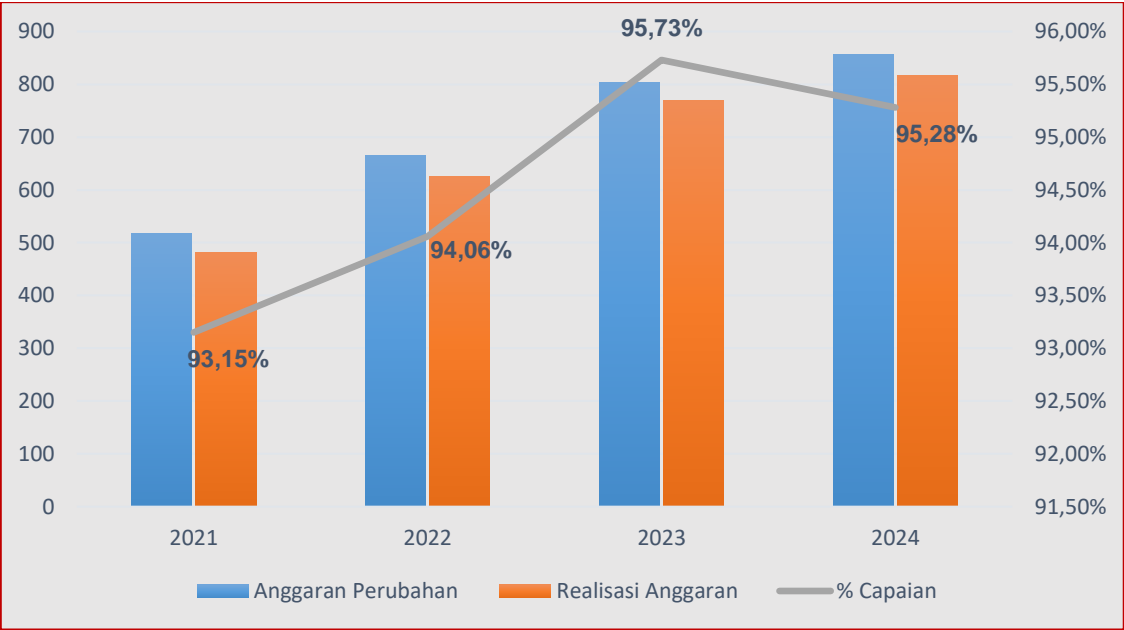
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020–2024 telah berhasil menunjukkan kinerja yang kuat, konsisten, dan berdampak nyata dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD serta memperkuat tata kelola organisasi secara menyeluruh. Hasil evaluasi sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional menggambarkan organisasi yang tidak hanya responsif terhadap dinamika tuntutan publik dan internal, namun juga mampu melebihi beberapa target yang telah ditentukan.

Kedepan, keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola perubahan secara proaktif, mempertahankan standar tinggi dalam layanan publik, dan secara konsisten memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang berbasis data. Dengan pendekatan ini, Sekretariat DPRD tidak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai lembang pendukung yang efektif bagi DPRD tetapi juga bertransformasi menjadi Perangkat Daerah (PD) yang adaptif dan unggul dalam menghadapi tantangan strategis masa depan.

#### **4. Capaian Kinerja Anggaran**

Pengelolaan anggaran merupakan aspek fundamental dalam menilai kinerja organisasi serta efektivitas tata kelola yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, organisasi secara konsisten memonitor realisasi anggaran guna memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak optimal bagi pencapaian tujuan

strategis. Dalam konteks tersebut, berikut disajikan rekapitulasi realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021 hingga 2024. Data dalam grafik ini memberikan pemahaman mengenai tren dan pola realisasi anggaran, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan referensi strategis bagi organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa depan.



Gambar 2.5 Grafik Kinerja Anggaran Tahun 2021-2024

Sumber: LKIP Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 2021 - 2024

Grafik realisasi anggaran Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2021–2024 memperlihatkan tren positif yang konsisten dalam pengelolaan anggaran organisasi. Realisasi anggaran yang tercatat mengalami peningkatan dari 93,15% pada tahun 2021 menjadi 94,06% pada tahun 2022, dan selanjutnya mencapai 95,73% pada tahun 2023 serta bertahan stabil di angka 95,28% pada tahun 2024. Pola peningkatan ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta menunjukkan semakin matangnya kapasitas internal organisasi dalam menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan anggaran sesuai perencanaan strategis.

Capaian realisasi anggaran yang tinggi dan konsisten ini menandakan bahwa organisasi telah mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal, serta menjalankan praktik tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kemampuan ini merupakan fondasi yang penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, sekaligus



menjadi indikator kuat terhadap meningkatnya kualitas tata kelola Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan tren pencapaian positif ini, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki peluang strategis dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Dengan terus memperkuat berbagai kapasitas internal yang telah berhasil dibangun selama periode sebelumnya, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ke depan.

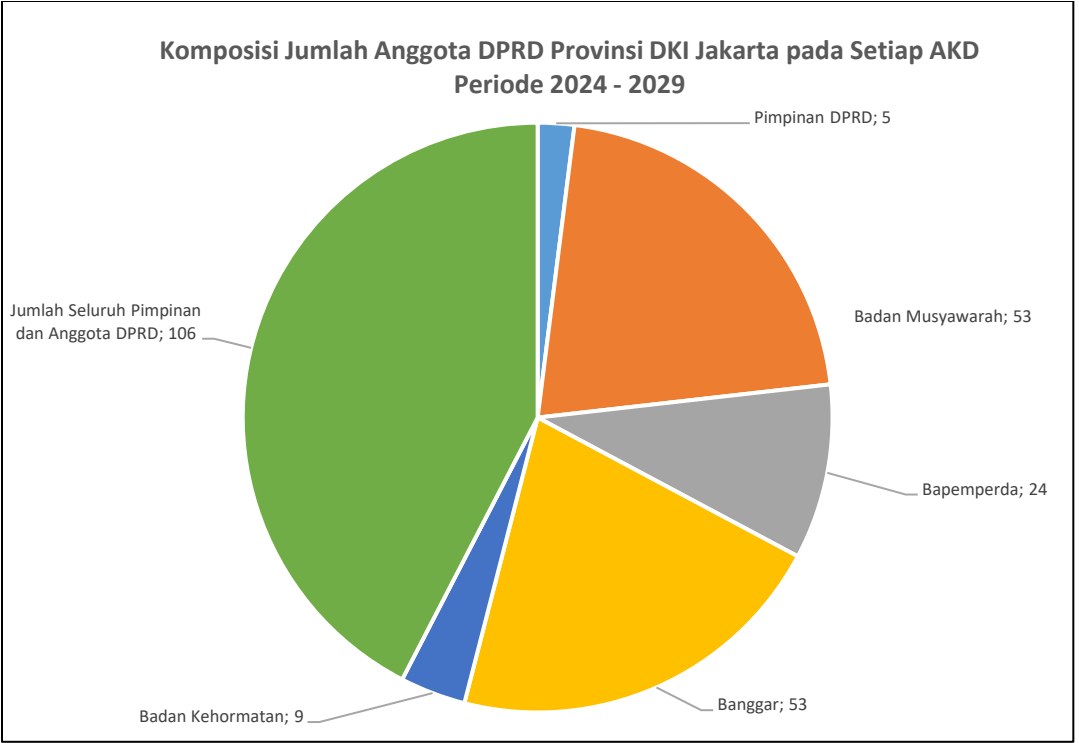
#### **II.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan merupakan elemen fundamental bagi efektivitas implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Dalam konteks Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuannya dalam memberikan layanan yang relevan, responsif, dan berdampak nyata kepada berbagai kelompok sasaran yang strategis.

Secara strategis, kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok utama:

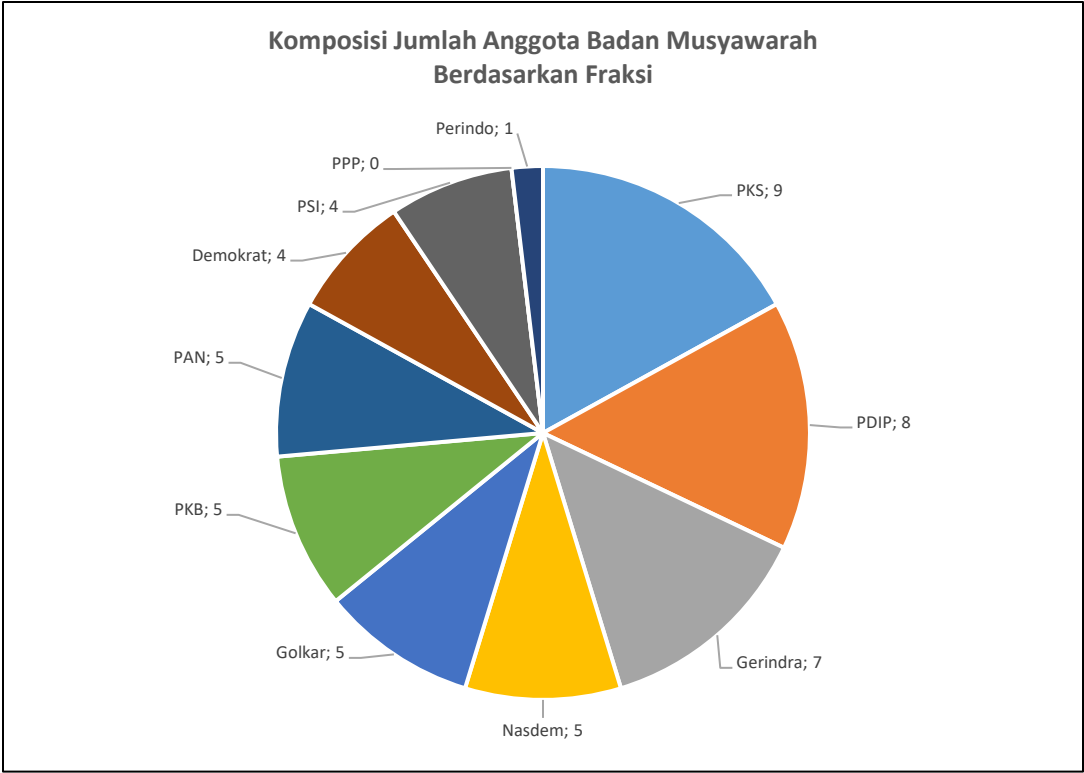
##### **1. Kelompok Sasaran Utama (*Direct Beneficiaries*)**

Kelompok ini mencakup Pimpinan DPRD (1 orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua) dan Anggota DPRD (101 orang), Fraksi-Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menerima dukungan teknis, administratif, dan fasilitasi dari Sekretariat DPRD. Evaluasi kinerja menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi secara konsisten, yang mencerminkan bahwa Sekretariat DPRD berhasil memenuhi ekspektasi utama dari kelompok ini dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD secara keseluruhan. Selanjutnya, berdasarkan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian, Sekretariat DPRD selain mendukung dan memfasilitasi DPRD sebagai Lembaga Legislatif juga memfasilitasi Eksekutif (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Berikut komposisi dan sebaran Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029 berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan dari masing-masing fraksi.



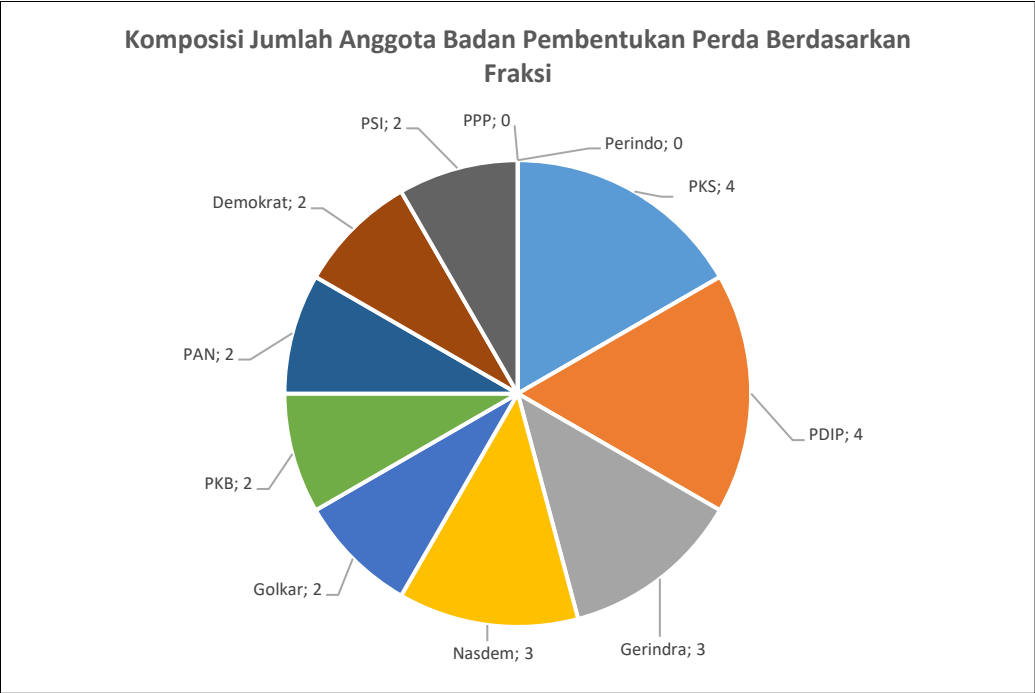
Sumber: Sekretariat DPRD (Data Diolah)

Gambar 2.6 Komposisi Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Setiap AKD Periode 2024 – 2029



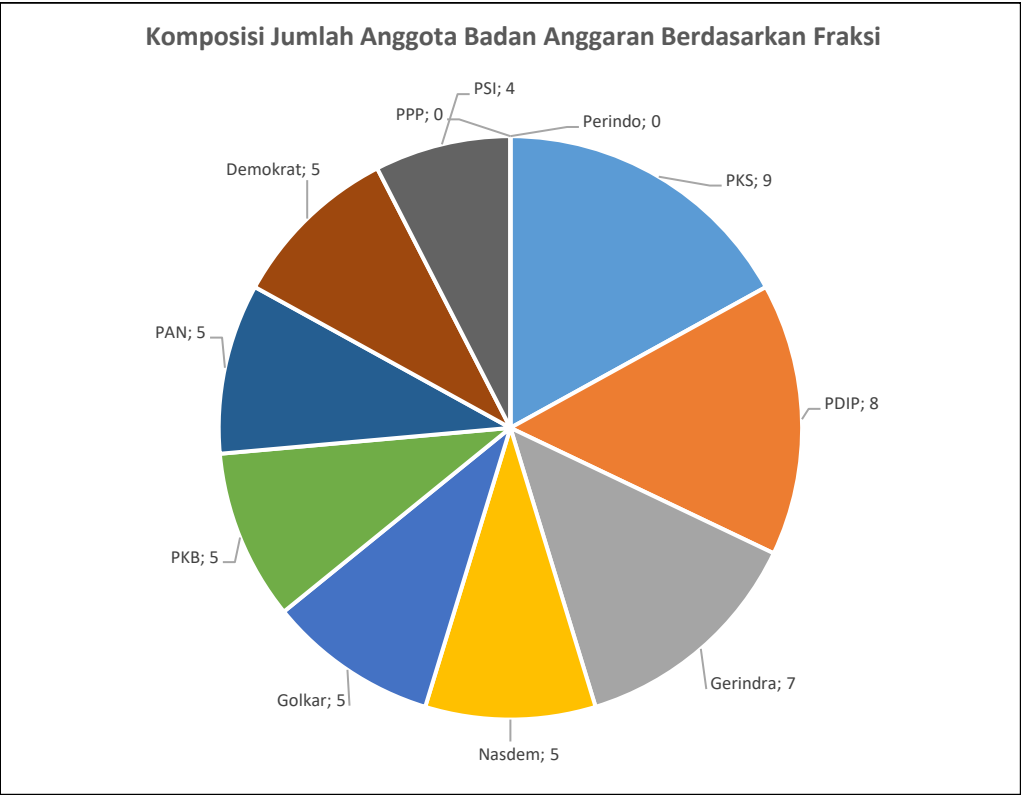
Sumber: Sekretariat DPRD (Data Diolah)

Gambar 2.7 Komposisi Jumlah Anggota Badan Musyawarah Berdasarkan Fraksi



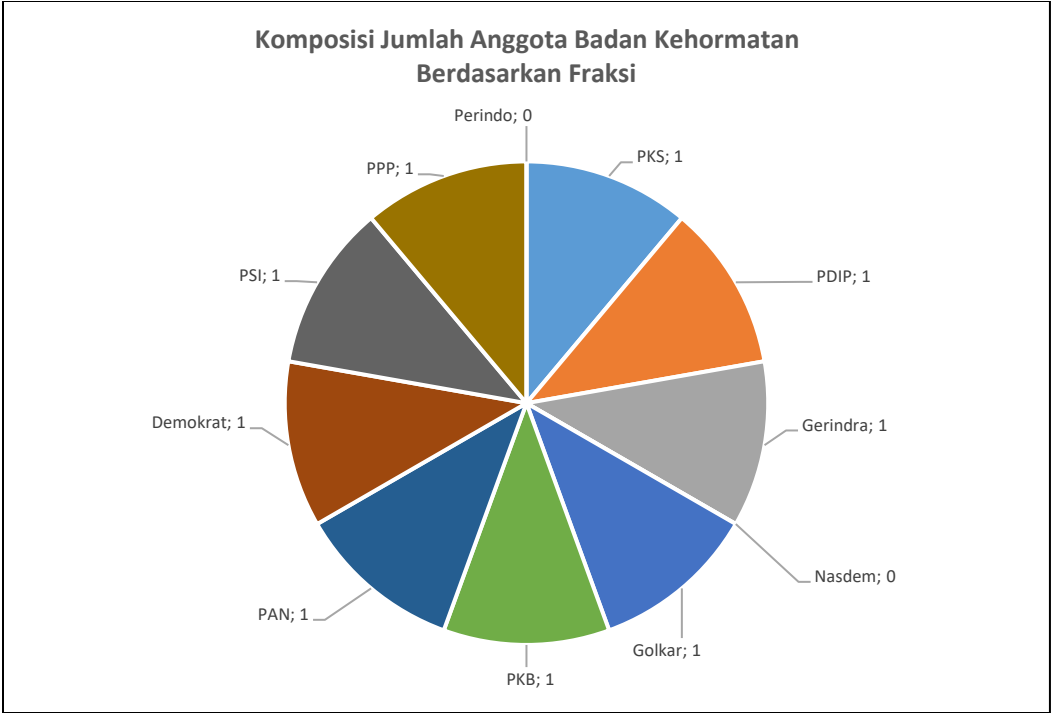
Sumber: Sekretariat DPRD (Data Diolah)

Gambar 2.8 Komposisi Jumlah Anggota Badan Pembentukan Perda Berdasarkan Fraksi



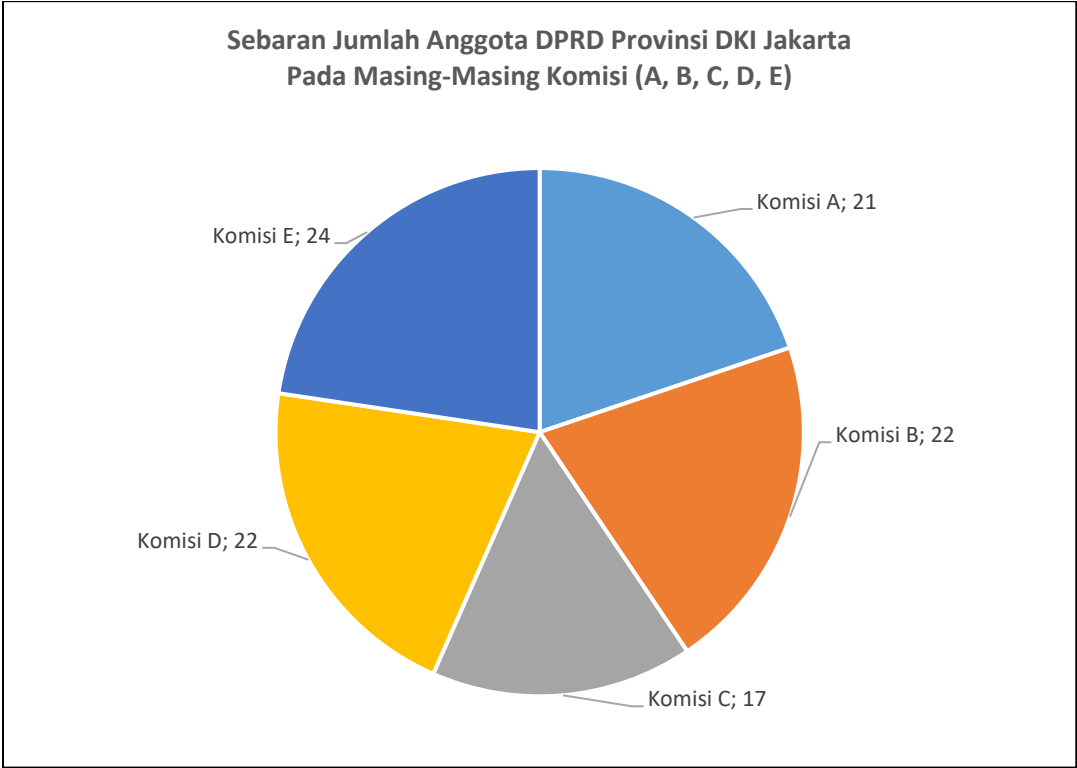
Sumber: Sekretariat DPRD (Data Diolah)

Gambar 2.9 Komposisi Jumlah Anggota Badan Anggaran Berdasarkan Fraksi



Sumber: Sekretariat DPRD (Data Diolah)

Gambar 2.10 Komposisi Jumlah Anggota Badan Kehormatan Berdasarkan Fraksi



Sumber: Sekretariat DPRD (Data Diolah)

Gambar 2.11 Sebaran Jumlah Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Pada Masing-Masing Komisi (A, B, C, D, E)

**2. Kelompok Sasaran Tidak Langsung (*Indirect Beneficiaries*)**

Terdiri dari masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media massa, dan sektor swasta. Meskipun tidak menerima layanan langsung, kelompok ini mendapatkan manfaat signifikan melalui akses terhadap informasi publik yang dikelola oleh Sekretariat DPRD. Tingginya tingkat aksesibilitas dan transparansi informasi yang tersedia menunjukkan bahwa organisasi mampu merespons kebutuhan kelompok ini dengan sangat baik, sehingga citra positif organisasi meningkat secara substansial di mata publik.

**3. Pemangku Kepentingan Strategis (*Strategic Stakeholders*)**

Kelompok ini mencakup instansi atau lembaga yang memiliki hubungan strategis dalam konteks Pemerintahan Daerah maupun nasional, antara lain:

- a. Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi mitra strategis Sekretariat DPRD dalam koordinasi kebijakan dan pelaksanaan keputusan daerah.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya, sebagai mitra kerja strategis yang berperan dalam berbagi *best practices* dan koordinasi antar lembaga legislatif lintas daerah.
- c. Lembaga Pemeriksa dan Pengawasan Eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas serta transparansi organisasi melalui pengawasan dan evaluasi berkala.

Evaluasi kinerja periode 2020–2024 terhadap hubungan strategis dengan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan hasil yang positif secara konsisten, terutama dalam hal koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis daerah, serta penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan dan pengawasan eksternal.

Tabel 2.7 Kinerja Layanan Hubungan Strategis Antar-Lembaga  
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta (2020–2024)

Pemangku Kepentingan Strategis	Jenis Hubungan Strategis	Tren Kinerja (2020-2024)	Catatan Analitis
Perangkat Daerah (PD) DKI Jakarta	Koordinasi kebijakan dan pelaksanaan keputusan daerah	Stabil meningkat setiap tahun	Kolaborasi dan koordinasi yang semakin kuat dan efektif
Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	Pertukaran informasi, <i>best practice</i> dan koordinasi antar-lembaga	Terus meningkat	Hubungan antar-lembaga semakin intensif, memperkuat jejaring strategis nasional



Pemangku Kepentingan Strategis	Jenis Hubungan Strategis	Tren Kinerja (2020-2024)	Catatan Analitis
Lembaga Pemeriksa Eksternal (BPK, BPKP)	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan eksternal	Optimal setiap tahun (100%)	Konsistensi organisasi dalam menindaklanjuti hasil audit memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Capaian positif Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan kepada berbagai kelompok sasaran selama periode sebelumnya menjadi fondasi penting bagi organisasi dalam menjawab tantangan yang muncul seiring transformasi Jakarta menuju Kota Global yang kompetitif, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan organisasi dalam melayani anggota DPRD, masyarakat umum, dan mitra strategis seperti Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya, serta lembaga pengawasan eksternal, menjadi aset berharga yang perlu terus ditingkatkan agar sejalan dengan visi besar transformasi tersebut.

Sejalan dengan posisi Jakarta yang semakin penting dalam konteks regional dan global, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu terus memperkuat kemitraan strategis lintas lembaga, termasuk dengan berbagai Organisasi Pemerintah Daerah, nasional, maupun internasional. Hubungan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan DPRD relevan dengan standar global, mendukung daya saing daerah, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi yang semakin kompleks dari pemangku kepentingan domestik maupun internasional.

Untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global (*Global City*), kapasitas organisasi dalam mengelola informasi secara transparan dan responsif harus terus ditingkatkan. Penguatan sinergi internal dan eksternal melalui komunikasi yang lebih intensif, integrasi data yang lebih baik, serta pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dengan kota-kota besar dunia menjadi agenda penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dengan pendekatan ini, organisasi diharapkan mampu mendukung DPRD dalam menciptakan kebijakan publik yang visioner dan berstandar nasional maupun internasional, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta turut mempercepat transformasi Jakarta menjadi pusat ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan yang terkemuka di tingkat global.

## **II.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **II.2.1 Permasalahan Pelayanan**

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki peran sentral dalam mendukung DPRD menjalankan fungsinya secara optimal di tengah tantangan baru yang muncul seiring dengan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global sebagaimana dicanangkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029, serta amanat khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dalam konteks ini, organisasi dituntut untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki agar dapat secara efektif memenuhi ekspektasi strategis dan operasional yang semakin tinggi.

Sejumlah permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian khusus dalam periode mendatang telah teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika Kota Global dan mandat khusus Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam regulasi terkini. Pemahaman terhadap berbagai permasalahan utama dan isu strategis tersebut menjadi landasan bagi Sekretariat DPRD dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang relevan. Dengan demikian, Sekretariat DPRD mampu secara efektif mendukung DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan strategis pembangunan daerah.

Berikut adalah permasalahan dominan yang memerlukan perhatian khusus dan respons organisasi secara terarah:

**1. Penguatan Fungsi DPRD (Fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan) secara transparan dan akuntabel**

DPRD sebagai Lembaga Legislatif memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Untuk itu diperlukan penguatan ketiga fungsi tersebut, secara transparan dan akuntabel.

**2. Pengelolaan aspirasi masyarakat yang belum terintegrasi**

Dalam ketentuan Pasal 129 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyatakan bahwa Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai

dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya integrasi data penerimaan maupun tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, maupun Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

**3. Struktur organisasi yang belum responsif terhadap dinamika kebutuhan DPRD sebagai dampak dari transformasi Kota Global.**

Struktur organisasi yang kurang adaptif menimbulkan tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam memenuhi tuntutan layanan DPRD yang semakin kompleks dan cepat berubah, khususnya dalam konteks peran strategis Jakarta sebagai Kota Global. Penting bagi Sekretariat DPRD untuk menyesuaikan Struktur Organisasi secara berkelanjutan, agar lebih responsif terhadap perubahan lingkungan global dan kebutuhan strategis DPRD.

**4. Kompetensi SDM yang belum memadai dalam mendukung digitalisasi dan analisis kebijakan strategis.**

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam analisis kebijakan berbasis data dan teknologi digital, secara langsung berdampak pada kemampuan Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan strategis yang efektif. Diperlukan penguatan kompetensi secara intensif dan terarah, yang melibatkan pelatihan serta pengembangan kapabilitas digital guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data.

**5. Integrasi teknologi informasi yang belum sepenuhnya optimal untuk mendukung komunikasi internal dan eksternal.**

Permasalahan integrasi teknologi informasi yang belum optimal menciptakan tantangan signifikan terhadap efektivitas koordinasi internal dan kolaborasi eksternal. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, Sekretariat DPRD perlu memastikan implementasi sistem informasi yang terintegrasi secara menyeluruh, dengan fokus pada interoperabilitas antar-unit kerja serta kemudahan akses informasi strategis bagi pemangku kepentingan eksternal.

**6. Efektivitas koordinasi antar lembaga yang belum optimal untuk mencapai sinergi strategis.**

Efektivitas koordinasi antar lembaga yang kurang optimal menghambat potensi pencapaian sinergi strategis antar pemangku kepentingan. Dalam rangka

memperkuat kapasitas strategis, Sekretariat DPRD perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan kolaborasi antar lembaga, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun dengan Institusi eksternal terkait lainnya, untuk mendukung pengambilan kebijakan publik yang lebih efektif dan berstandar global.

**7. Responsivitas layanan administrasi dan protokol yang belum sepenuhnya cepat dan adaptif terhadap kebutuhan anggota DPRD.**

Responsivitas yang terbatas dalam layanan administrasi dan protokol menciptakan hambatan dalam mendukung anggota DPRD melaksanakan tugas-tugas strategisnya. Dibutuhkan peningkatan kapabilitas dan kecepatan respons layanan melalui pendekatan berbasis teknologi dan standar pelayanan yang lebih tinggi guna memastikan kelancaran proses administratif dan protokoler.

**8. Keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan data strategis guna mendukung pengambilan keputusan DPRD.**

Keterbatasan dalam pengelolaan data strategis menyebabkan kesulitan bagi DPRD dalam mengambil keputusan yang akurat dan tepat waktu. Penguatan kapasitas pengelolaan data strategis melalui integrasi teknologi digital, peningkatan kualitas data, dan peningkatan kemampuan analisis menjadi prioritas untuk mendukung keputusan strategis DPRD secara optimal.

**9. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.**

Implementasi SPBE yang belum maksimal menghambat upaya organisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Untuk mencapai tujuan transformasi digital yang menyeluruh, Sekretariat DPRD perlu mengadopsi pendekatan integratif dalam implementasi SPBE, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

**10. Tantangan dalam menjaga konsistensi pencapaian realisasi anggaran yang tinggi dan efektif.**

Walaupun tingkat realisasi anggaran menunjukkan capaian positif, konsistensi dalam mencapai realisasi anggaran secara efektif masih menjadi tantangan strategis. Sekretariat DPRD perlu memperkuat mekanisme perencanaan anggaran, sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran agar dapat secara konsisten mendukung pencapaian tujuan strategis DPRD secara optimal.

#### **11. Belum optimalnya penerapan aspek/konsep keberlanjutan dalam pengelolaan gedung kantor**

Pengelolaan Gedung kantor kedepan diharapkan dapat menerapkan konsep *green building*, hemat energi dan pengurangan jejak karbon, menjadi bangunan yang efisien dan ramah lingkungan.

Melalui pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan utama tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat secara strategis mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjawab tantangan di masa depan, memastikan dukungan yang kuat bagi DPRD dalam menjalankan fungsi strategisnya serta secara optimal mendukung transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang kompetitif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

#### **II.2.2 Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan rumusan isu strategis yang jelas, terarah, dan relevan. Rumusan isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan potensi daerah, kewenangan Sekretariat DPRD, rekomendasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan dinamika lingkungan strategis baik dalam skala global, nasional, maupun regional. Tabel berikut menyajikan secara komprehensif dan sistematis berbagai isu strategis utama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan strategis organisasi untuk periode 2025–2029.

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Pembentukan Peraturan Daerah yang setiap tahun ditetapkan.  Sistem Legislasi Daerah (Silegda) sebagai <i>dashboard</i> monitoring proses pembahasan Raperda	Belum optimalnya peningkatan kinerja DPRD dalam pembentukan perda  Capaian Propemperda: Tahun 2020: 23,08% Tahun 2021: 17,86% Tahun 2022: 29,17% Tahun 2023: 20% Tahun 2024: 44,83%	-	Adanya komitmen DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan serta sejajar dengan Parlemen yang ada di tingkat global	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM (PN 1 RPJMN 2025-2029)	Transformasi kelembagaan Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi-fungsi DPRD	Penguatan Fungsi DPRD (Fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan) secara Transparan dan Akuntabel
Penggunaan Aplikasi SiMONAS dalam pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Belum optimalnya peningkatan kinerja DPRD dalam mengakomodir aspirasi masyarakat	-	Adanya komitmen DPRD dalam mendukung dan meneruskan aspirasi masyarakat yang terintegrasi dan sejajar dengan Parlemen yang ada di tingkat global	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM (PN 1 RPJMN 2025-2029)	Terlaksananya pengelolaan aspirasi masyarakat yang terintegrasi, responsif dan terdigitalisasi	Pengelolaan aspirasi masyarakat yang belum terintegrasi
Kelembagaan Sekretariat DPRD sesuai Pergub 57 Tahun 2022	Struktur organisasi belum fleksibel menghadapi transformasi Kota Global	Kelembagaan pemerintahan adaptif terhadap dinamika globalisasi	Tuntutan global akan kelembagaan publik yang responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Kelembagaan pemerintahan dituntut adaptif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang <i>real-time</i>	Perlunya Kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan regulasi, serta responsif terhadap kebutuhan anggota DPRD dalam menyediakan dukungan administratif, data, kajian, dan layanan berbasis teknologi untuk memperkuat fungsi DPRD	Penguatan Struktur Organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan DPRD dalam konteks transformasi global dan amanat UU Nomor 2 Tahun 2024



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kapasitas SDM yang Kompeten dalam Digitalisasi dan Analisis Kebijakan	Kompetensi SDM belum memadai untuk mendukung digitalisasi dan analisis kebijakan	Penguatan kapasitas SDM berbasis digital dan analitik untuk mendukung layanan publik	Transformasi digital di tingkat global yang menuntut kompetensi digital dan analisis yang tinggi	Transformasi digital terhadap percepatan pemanfaatan teknologi yang menuntut kompetensi SDM digital tinggi	Perlunya peningkatan SDM yang kompeten dalam digitalisasi untuk memastikan setiap keputusan berbasis data, dan adaptif terhadap tantangan perkotaan dan tuntutan masyarakat	Peningkatan kompetensi SDM dalam aspek digitalisasi dan analisis kebijakan strategis untuk mendukung DPRD
Penggunaan Sistem Informasi yang Terintegrasi secara Optimal	Integrasi sistem informasi belum optimal untuk komunikasi internal dan eksternal	Digitalisasi layanan pemerintahan yang terintegrasi secara optimal	Tren global dan nasional dalam digitalisasi layanan publik dan integrasi data	Kebutuhan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi secara optimal, aman, transparan, dan <i>real-time</i>	Kebutuhan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi secara optimal, serta memastikan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi kompleksitas isu perkotaan dan dinamika global	Optimalisasi integrasi sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal dan eksternal
Hubungan Sinergi Strategis Antar Lembaga Pemerintah	Koordinasi antar lembaga belum optimal untuk mencapai sinergi strategis	Penguatan sinergi kelembagaan untuk efektivitas governance publik	Tuntutan global terhadap kolaborasi strategis antar lembaga dalam pemerintahan	Sinergi strategis antar lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan koordinasi program lintas sektor	Tuntutan Jakarta untuk mengelola kompleksitas perkotaan, dan memperkuat layanan publik	Penguatan koordinasi antar lembaga strategis guna mendukung posisi strategis Jakarta sebagai Kota Global
Tersedianya Kapasitas Pengelolaan Data Strategis yang Efektif	Kapasitas pengelolaan data strategis yang terbatas dalam mendukung keputusan DPRD	Pengelolaan data strategis untuk efektivitas pengambilan keputusan publik	Kebutuhan global terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data strategis yang akurat dan cepat	Kapasitas pengelolaan data strategis yang efektif sangat penting untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti, dan meningkatkan akuntabilitas publik	Kapasitas pengelolaan data strategis yang efektif dalam mendukung fungsi DPRD untuk dapat menghasilkan Keputusan DPRD	Penguatan kapasitas pengelolaan data strategis untuk mendukung pengambilan keputusan DPRD secara efektif

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Responsivitas Layanan Administrasi dan Protokol yang Optimal	Responsivitas layanan administrasi dan protokol belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan anggota DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan adaptif	Tuntutan terhadap responsivitas layanan administrasi dan protokol untuk mendukung diplomasi, kerja sama, dan citra positif	Tuntutan nasional terhadap layanan publik yang responsif dan cepat	Tuntutan pelayanan administrasi dan protokol yang optimal untuk memperkuat dukungan kelembagaan	Peningkatan responsivitas layanan administrasi dan protokol sesuai kebutuhan strategis DPRD
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Menyeluruh	Belum optimalnya implementasi SPBE secara menyeluruh	Implementasi sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan menyeluruh	Transformasi digital di tingkat global dalam implementasi SPBE	Transformasi digital di tingkat nasional dalam implementasi SPBE	Transformasi digital dalam implementasi SPBE untuk memperkuat tata kelola sekaligus mendukung target dalam transformasi digital pemerintahan	Optimalisasi implementasi SPBE guna mendukung efektivitas tata kelola organisasi secara menyeluruh
Realisasi Anggaran yang Efektif dan Optimal	Tantangan dalam menjaga konsistensi pencapaian realisasi anggaran yang tinggi dan efektif	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik	Tuntutan global terhadap efektivitas realisasi anggaran organisasi publik, serta ketidakstabilan global	Tekanan nasional dan regional terhadap efektivitas realisasi anggaran organisasi publik	Konsistensi realisasi anggaran yang tidak hanya terkait serapan anggaran, namun efektivitas dan kualitas program	Penguatan konsistensi realisasi anggaran yang tinggi, efektif, dan optimal
Penerapan konsep keberlanjutan dalam pengelolaan gedung kantor	Belum diterapkannya konsep <i>green building</i> pada bangunan kantor	Bangunan kantor yang Ramah Lingkungan ( <i>Green Building</i> ) dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/ <i>Waste Management</i> )	Bangunan Ramah Lingkungan/ <i>Green Building</i> dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/ <i>Waste Management</i> )	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> dikawasan perkotaan metropolitan	Peningkatan akses pembiayaan inovatif untuk menunjang pengembangan IPTEK dan penerapan teknologi yang <i>climate friendly</i> ( <i>Green building</i> , pengembangan energi terbarukan)	Penerapan aspek/konsep keberlanjutan dalam pengelolaan gedung kantor

Dengan rumusan isu strategis ini, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat mengarahkan langkah-langkah strategisnya secara lebih fokus, efektif, dan sesuai dengan tantangan strategis di masa depan dalam rangka mendukung optimalisasi fungsi DPRD serta transformasi Jakarta sebagai Kota Global sebagaimana diatur dalam RPJMD 2025–2029 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

### **II.3 Reviu RPJMN dan Renstra K/L yang Terkait dengan Sekretariat DPRD**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tertanggal 10 Februari 2025. RPJMN Tahun 2025–2029 ini merupakan tahap pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan menjadi fondasi awal untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai dokumen perencanaan nasional, RPJMN berfungsi sebagai acuan utama bagi Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana strategis masing-masing. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 harus mengacu dan selaras dengan arah kebijakan dan target-target yang termuat dalam RPJMN tersebut, disamping mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretariat DPRD secara spesifik di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **II.3.1 Prioritas Nasional Terkait Demokrasi dan Tata Kelola**

RPJMN 2025–2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional (PN) sesuai 8 (delapan) Misi Presiden (Asta Cita). Beberapa prioritas yang relevan bagi Sekretariat DPRD antara lain:

##### **1. Prioritas Nasional 1 (PN 1) : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM**

Prioritas pertama ini menekankan penguatan kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, di samping pembinaan ideologi kebangsaan. Indikator utama keberhasilan PN1 antara lain Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Hak Asasi Manusia, yang digunakan untuk mengukur perkembangan kualitas demokrasi serta penghormatan HAM di tingkat nasional. Dalam kerangka PN1, terdapat Program Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi” yang diarahkan untuk mewujudkan lembaga-lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi substansial.

Arah kebijakan program ini mencakup perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu, peningkatan akuntabilitas partai politik, penguatan lembaga perwakilan yang responsif (Legislatif), serta pengembangan media dan pers yang berkualitas. Hal ini berarti peningkatan kinerja dan kapasitas DPR/DPRD sebagai lembaga legislatif menjadi salah satu fokus pembangunan politik nasional. Bagi Sekretariat DPRD, agenda ini relevan karena kualitas kinerja DPRD di daerah yang didukung oleh Sekretariat DPRD turut menentukan keberhasilan penguatan demokrasi di tingkat lokal.

### **II.3.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Peran Sekretariat DPRD**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menjadi tolok ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Metode penghitungan IDI (sejak 2021 dengan metode baru) mencakup tiga aspek utama: Kebebasan Sipil, Kesenjangan Politik, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, dengan total 22 (dua puluh dua) indikator spesifik. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi inilah yang paling terkait dengan kinerja lembaga-lembaga politik formal, termasuk lembaga legislatif (DPR/DPRD). Secara metodologis, salah satu indikator pada aspek kapasitas lembaga demokrasi adalah “Kinerja Lembaga Legislatif” di suatu daerah, yang datanya bersumber dari Sekretariat DPRD. Dengan kata lain, kualitas kinerja DPRD (fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan) yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD akan tercermin dalam nilai IDI wilayah tersebut.

Kontribusi Sekretariat DPRD terhadap demokrasi daerah dapat dilihat dari perannya dalam mendukung aktivitas DPRD yang inklusif dan efektif. Misalnya, kelancaran penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD (AKD), rapat dengar pendapat dengan masyarakat, transparansi penyusunan Perda, hingga pelibatan publik dalam proses Legislasi/Pembentukan Perda merupakan area yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) selaku penyusun IDI bahkan menyebut bahwa dari 22 indikator IDI, faktor-faktor yang dapat diintervensi langsung oleh DPRD bersama Sekretariat DPRD adalah peran dan kinerja DPRD itu sendiri. Oleh karena itu, perbaikan kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas anggota dewan, dukungan Staf, dan Tenaga Ahli, serta fasilitasi yang memadai dari Sekretariat DPRD menjadi kunci untuk mendorong demokrasi substantif di daerah.

### II.3.3 Kondisi Indeks Demokrasi di DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta selama ini menunjukkan kinerja demokrasi yang relatif baik menurut IDI. Pada tahun 2022, IDI di DKI Jakarta mencapai nilai 82,13 (skala 0–100) dan termasuk kategori “tinggi”. Meskipun nilai tersebut hanya sedikit meningkat dari 82,08 pada 2021, secara peringkat nasional DKI mengalami penurunan dari peringkat 1 pada 2021 menjadi peringkat 7 pada 2022, karena Provinsi lain mengalami kemajuan lebih pesat. Capaian ini menandakan bahwa ruang demokrasi di Jakarta sudah cukup terbuka dan stabil. Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat sipil, dan media, yang berkontribusi pada iklim politik yang kondusif.

Namun demikian, analisis komponen IDI DKI Jakarta mengungkap adanya aspek yang masih perlu ditingkatkan. Skor IDI DKI Jakarta untuk aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi tahun 2022 tercatat 73,12, lebih rendah dibanding aspek Kebebasan Sipil (yang cenderung mendekati 90) dan aspek Kesetaraan. Meskipun angka 73,12 tersebut sudah mengalami peningkatan dari 70,69 di tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa kinerja lembaga demokrasi di Jakarta masih berada pada kategori “sedang” dan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Indikator-indikator dengan capaian terendah dalam aspek ini antara lain adalah kinerja lembaga legislatif (DPRD) dan beberapa indikator lain seperti netralitas penyelenggara Pemilu.

Konteks perencanaan daerah DKI Jakarta Tahun 2025–2029 juga mencermati hal tersebut. Pemerintah Provinsi menyadari bahwa upaya penguatan lembaga demokrasi daerah harus terus dilakukan, seiring peningkatan partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan. Peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan politik semata, tetapi juga seberapa efektif lembaga perwakilan daerah menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, agenda pembangunan DKI Jakarta kedepan diproyeksikan akan menitikberatkan pada penguatan kinerja DPRD dan peningkatan kanal-kanal partisipasi warga seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), konsultasi publik, dan transparansi informasi, sejalan dengan arahan RPJMN untuk mendorong demokrasi yang substansial. Hal ini sejalan pula dengan salah satu agenda nasional yang menekankan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, antara lain melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil.

#### **II.3.4 Implikasi bagi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029**

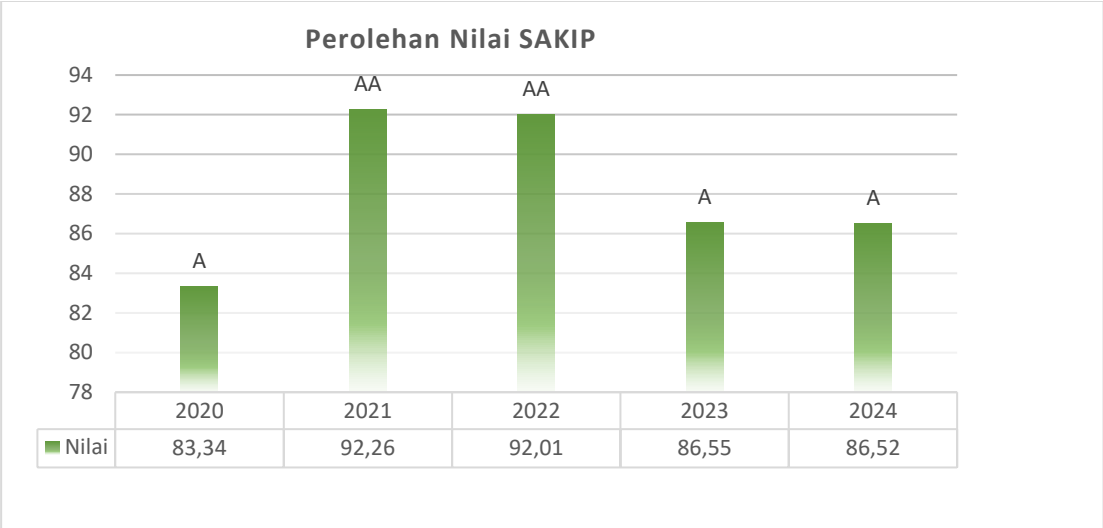
Berdasarkan hasil revidi di atas, terdapat sejumlah implikasi strategis yang perlu diakomodir dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029. Seluruh hal tersebut harus sesuai dengan tupoksi Sekretariat DPRD sebagai pendukung kelancaran fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Beberapa upaya penguatan yang akan dioptimalkan meliputi :

##### **1. Penguatan Kapasitas Lembaga DPRD**

Merumuskan program-program untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Contohnya, fasilitasi penyusunan peraturan daerah yang partisipatif, peningkatan kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui bimbingan teknis dan penyediaan tenaga ahli, serta perbaikan tata kelola persidangan dan rapat dewan. Langkah-langkah ini sejalan dengan program prioritas Penguatan Lembaga Demokrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mendorong lembaga perwakilan yang responsif dan akuntabel. Dengan dukungan Sekretariat DPRD yang profesional, DPRD diharapkan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan efektif dalam menjalankan fungsi representasi, sehingga berkontribusi pada peningkatan IDI di daerah.

##### **2. Implementasi Reformasi Birokrasi di Sekretariat DPRD**

Menginternalisasikan agenda Reformasi Birokrasi sesuai arahan nasional untuk mewujudkan birokrasi daerah yang bersih, efektif, dan berbasis kinerja. Dalam Renstra, perlu ditetapkan sasaran peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Internal Sekretariat DPRD, dan peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun perolehan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dari tahun 2020 sampai dengan 2024, sebagai berikut :



Sumber : Sekretariat DPRD

Gambar 2.12 Grafik Perolehan Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi DKI JakartaTahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2023 dan 2024 terdapat penurunan perolehan Nilai dan Predikat SAKIP pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, hal ini disebabkan karena adanya perubahan Komponen Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

3. Percepatan Digitalisasi Layanan Sekretariat (SPBE)

Menjabarkan inisiatif untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai standar KemenPANRB. Sekretariat DPRD perlu mengembangkan atau memperkuat sistem digital dalam administrasi dan layanan, misalnya: aplikasi *e-office*, sistem informasi penataan agenda dewan (*e-Bamus*), SiAGA, *e-Perdin*, *e-tamu*, SiMONAS, *e-SPJ*, hingga Website DPRD sebagai portal keterbukaan informasi DPRD. Hal ini penting guna memenuhi target peningkatan indeks SPBE Pemerintah Daerah serta meningkatkan efisiensi dan transparansi kinerja Sekretariat DPRD. KemenPANRB menekankan bahwa Transformasi Digital Pemerintah bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga perubahan proses bisnis, SDM, dan budaya kerja menuju layanan publik yang terpadu dan berorientasi pengguna. Dalam konteks Sekretariat DPRD, digitalisasi akan mendorong pelayanan yang lebih cepat kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan masyarakat, sesuai SPBE.



#### **4. Penguatan Sistem Merit dan SDM Aparatur**

Renstra Sekretariat DPRD memuat strategi peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD yang berbasis sistem merit (meritokrasi). Hal ini berarti manajemen ASN di lingkungan Sekretariat DPRD, seperti rekrutmen, promosi, dan pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan secara transparan, adil, dan berbasis kualifikasi serta kinerja. SDM Sekretariat DPRD yang kompeten dan berintegritas akan memastikan dukungan administratif dan substansi kepada DPRD berjalan optimal.

#### **5. Peningkatan Partisipasi dan Pelayanan Publik**

Sebagai *supporting system* bagi lembaga DPRD, Sekretariat DPRD berperan menjembatani interaksi antara DPRD dengan pihak eksekutif serta masyarakat. Oleh karena itu, Renstra sebaiknya mencantumkan program untuk mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi, anggaran, dan pengawasan, dengan penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRD dan keterbukaan informasi, fasilitasi forum-forum dialog antara konstituen dengan Anggota DPRD, serta inovasi layanan aspirasi (seperti aplikasi pengaduan atau konsultasi publik *online*). Upaya ini mendukung target peningkatan Indeks Demokrasi terutama pada aspek partisipasi politik warga. Arah kebijakan nasional jelas mengamankan perlunya komunikasi publik yang adil dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, maka Sekretariat DPRD harus mengambil peran aktif mewujudkannya di level daerah. Dengan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi kinerja DPRD, kepercayaan publik terhadap DPRD dapat terpelihara.

#### **6. Sinergi dengan Kebijakan K/L Terkait**

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan sinkronisasi program dengan kebijakan instansi pusat yang relevan. Selain RPJMN dari Bappenas, panduan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB perlu diacu, misalnya Kemendagri sebagai Pembina Pemerintah Daerah menerbitkan regulasi dan asistensi terkait penguatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD (termasuk dalam hal digitalisasi administrasi persidangan atau rapat DPRD dan inovasi layanan Sekretariat DPRD).

Demikian pula, arahan KemenPAN RB tentang evaluasi SPBE dan Reformasi Birokrasi harus diimplementasikan di lingkungan Sekretariat DPRD. Partisipasi Sekretariat dalam berbagai evaluasi nasional (evaluasi RB, SPBE, SAKIP, IDI) hendaknya dijadikan momentum perbaikan berkelanjutan. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta akan selaras dengan agenda nasional sekaligus memenuhi kebutuhan spesifik lokal.

## BAB III

# Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



## BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam era transformasi Jakarta menuju status sebagai Kota Global yang kompetitif, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, peran Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta semakin strategis. Sebagai lembaga pendukung utama bagi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan DPRD, Sekretariat DPRD dituntut tidak hanya mampu menyesuaikan diri secara cepat dengan dinamika lokal, nasional maupun global, namun juga secara proaktif berperan dalam memperkuat tata kelola demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, dan mendorong kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kebhinekaan. Oleh karena itu, penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan untuk periode 2025–2029 ini merupakan fondasi penting dalam menentukan langkah-langkah strategis organisasi yang tepat dan relevan, guna memastikan kontribusi nyata Sekretariat DPRD dalam mendukung Visi Pembangunan Jakarta sebagai *Global City* yang unggul di tingkat nasional maupun internasional.

### III.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, diperlukan dasar yang kuat untuk memastikan arah pengembangan organisasi sejalan dengan tujuan pembangunan daerah secara luas. Sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab mendukung DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, pengawasan, dan penganggaran secara optimal. Oleh karena itu, penetapan tujuan dan sasaran Renstra harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, agar tercipta konsistensi dan kesinambungan antara arah kebijakan daerah dengan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan strategis kepada DPRD.

Sebagai panduan strategis penyusunan Renstra, berikut ini Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 yang menjadi landasan dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta lima tahun ke depan.



### III.1.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029

Visi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

**“Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”**

Visi ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mentransformasikan Jakarta menjadi kota yang berdaya saing internasional, berkelanjutan secara lingkungan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan inklusif bagi seluruh warganya. Untuk mewujudkan visi tersebut, peran DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat strategis dalam memastikan tersusunnya kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang konsisten, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung utama DPRD memiliki tanggung jawab strategis untuk menyediakan pelayanan administratif, teknis, dan operasional yang optimal. Dengan demikian, Sekretariat DPRD berperan penting dalam memastikan DPRD dapat menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan secara efektif guna mendukung pencapaian visi pembangunan daerah tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 5 (lima) misi strategis yang menjadi pedoman operasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara konkret. Berikut ini adalah misi-misi yang akan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, strategi, dan implementasi program, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera.
2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata.
3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal.
4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dari kelima misi tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta secara khusus memiliki relevansi strategis dalam mendukung pelaksanaan misi satu yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu:

Misi 1:

**“Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera”**

Misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup warga kota melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam aspek demokrasi lokal, partisipasi publik, dan penguatan nilai kebhinekaan.

Selaras dengan Misi 1 RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis untuk turut mewujudkan tujuan pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penguatan nilai demokrasi dan partisipasi publik berbasis kebhinekaan. Untuk memastikan keterpaduan antara tujuan strategis daerah dengan sasaran kinerja Sekretariat DPRD, berikut disajikan matriks yang menggambarkan hubungan antara misi, tujuan, sasaran strategis, indikator *outcome* dan indikator kinerja sasaran yang relevan.

Tabel 3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja RPJMD 2025 - 2030

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
						2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera	Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan	Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	84,60	85,78	86,85	87,93	89,00	89,13	89,13

Sumber : SIPJM Jakarta 2025-2029

Berdasarkan dari Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Strategis RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun tujuan dan sasaran strategis yang mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah. Penetapan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi yang dinamis pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

### III.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dirancang untuk memperkuat dukungan kelembagaan kepada DPRD agar dapat menjalankan fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Tujuan ini secara pembentukan peraturan strategis juga diarahkan untuk meningkatkan nilai demokrasi, partisipasi publik, transparansi, serta memperkuat kebhinekaan dalam mendukung pencapaian visi Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, sasaran-sasaran strategis disusun sebagai panduan operasional organisasi guna memastikan efektivitas, profesionalitas, serta relevansi peran Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung utama DPRD. Sasaran-sasaran ini diharapkan mampu mendorong organisasi agar adaptif terhadap berbagai tantangan yang muncul, sehingga dapat secara nyata memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang.

**a. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 adalah:**

**“Meningkatnya Nilai Demokrasi Melalui Penguatan Kinerja Lembaga Legislatif Secara Efektif dan Akuntabel”**

Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 secara jelas menggambarkan komitmen kuat organisasi untuk membangun kapasitas internal yang mampu menyediakan dukungan kelembagaan dengan kualitas tinggi bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dukungan yang dimaksud mencakup layanan administratif, teknis, serta operasional yang dijalankan secara profesional, yakni dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, sistem kerja yang efektif, dan layanan yang memenuhi standar terbaik, melalui beberapa aplikasi pendukung seperti Aplikasi SiAGA dan e-Bamus.



## Indikator Kinerja Tujuan:

### **“Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Pada Indeks Demokrasi Indonesia”**

Lebih lanjut, Sekretariat DPRD juga dituntut untuk menjadi organisasi yang adaptif, yaitu mampu dengan cepat dan tepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik dalam aspek kebijakan nasional, kondisi lokal Jakarta, maupun perkembangan global yang relevan. Dengan karakter adaptif ini, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat secara proaktif mengantisipasi berbagai tantangan dan memastikan agar layanan yang diberikan senantiasa relevan dengan kebutuhan DPRD maupun publik.

Aspek responsivitas menunjukkan kesiapan Sekretariat DPRD untuk memberikan layanan yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan internal DPRD maupun ekspektasi masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya kepekaan organisasi dalam menangkap aspirasi dan dinamika yang berkembang, khususnya dalam konteks demokrasi lokal, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi ciri khas masyarakat Jakarta.

Secara keseluruhan, Tujuan Renstra ini dirancang agar Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta secara efektif mampu mendukung optimalisasi fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan partisipasi publik secara aktif, serta memelihara harmoni sosial berbasis kebhinekaan. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta turut berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang berkelanjutan dalam pembangunan, kompetitif dalam berbagai aspek, dan inklusif dalam menyediakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan Tujuan Renstra yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan sasaran strategis utama sebagai acuan operasional. Sasaran ini dirancang secara khusus guna mencerminkan arah strategis Sekretariat DPRD dalam memperkuat profesionalisme pelayanan, meningkatkan partisipasi publik yang inklusif, serta menguatkan kapasitas kelembagaan yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

**b. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah:**

**“Meningkatkan Efektivitas Fungsi pembentukan perda dan Pengawasan Dalam Menyerap serta Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Secara Transparan dan Akuntabel”**

Sasaran ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan administratif, teknis, dan operasional oleh Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, guna memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Provinsi DKI Jakarta secara optimal. Melalui profesionalisme layanan yang tinggi, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses pembentukan peraturan daerah, pengambilan kebijakan dan pengawasan kebijakan publik oleh DPRD, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal dan pengelolaan pemerintahan daerah secara umum, melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Aspirasi (SiMONAS) untuk pemantauan hasil aspirasi masyarakat.

**Indikator Kinerja Sasaran:**

**“Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan Pada Indeks Demokrasi”**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait relevansi antara Visi, Misi, Tujuan, serta Sasaran Strategis RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dengan kebutuhan strategis Sekretariat DPRD, berikut ini disajikan matriks tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang secara terstruktur merefleksikan arah strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung optimalisasi fungsi DPRD serta pencapaian visi pembangunan daerah lima tahun ke depan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat (Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera)	Meningkatnya nilai demokrasi melalui penguatan kinerja lembaga legislatif secara efektif dan akuntabel		Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Indonesia	36,84 %	36,9 %	36,95 %	37%	37%	37,1 %	-
		Meningkatkan efektivitas fungsi pembentukan perda dan pengawasan dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara transparan dan akuntabel.	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi.	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	-

Sumber: SIPJM Jakarta 2025-2029

Tabel di atas disusun sebagai hasil integrasi antara tujuan dan sasaran strategis RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dengan kebutuhan internal dan tantangan strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD. Sasaran yang ditetapkan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari profesionalitas pelayanan administratif dan teknis, partisipasi publik yang inklusif dalam kebijakan daerah, hingga penguatan kapasitas internal organisasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan memastikan bahwa peran strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan secara optimal, sekaligus secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian visi Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif.

III.2 Strategi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 secara efektif, diperlukan serangkaian strategi komprehensif yang mencakup langkah-langkah konkrit dalam optimalisasi sumber daya, fokus tahapan, serta penetapan program dan kegiatan prioritas secara jelas dan terukur. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan global, nasional, dan kebutuhan lokal Provinsi DKI Jakarta yang terus berkembang dalam mendukung transformasi menjadi Kota Global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi ini juga telah disusun selaras dengan strategi pembangunan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan *Critical Success Factor*

(CSF) dalam Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yaitu **“Peningkatan Kualitas Layanan Legislatif untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”** yang menjadi Bidang Urusan Sekretariat DPRD.

Berikut ini disajikan tabel strategi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, yang disusun dalam 5 (lima) tahapan prioritas pembangunan tahunan:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029

TAHAP I 2026 (Fondasi Awal)	TAHAP II 2027 (Akselerasi Pengembangan Pelayanan)	TAHAP III 2028 (Integrasi Pelayanan Digital)	TAHAP IV 2029 (Penguatan Kolaborasi Publik)	TAHAP V 2030 (Pemantapan Layanan Berkelanjutan)
<b>Strategic HR Alignment-</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemetaan kompetensi SDM berbasis tugas pelayanan DPRD</li><li>- Redesain Struktur Organisasi berbasis kebutuhan strategis</li></ul>	<b>Professional Development</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berstandar nasional</li><li>- Standardisasi layanan administrasi dan teknis</li></ul>	<b>Digital Administrative Excellence</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Integrasi sistem administrasi digital secara terpadu (e-administration)</li><li>- Penguatan <i>knowledge management</i> dalam pelayanan DPRD</li></ul>	<b>Performance Management Integration</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi dan optimalisasi layanan administratif dan teknis melalui sistem manajemen kinerja berbasis teknologi</li><li>- Perbaikan standar pelayanan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan dinamis</li></ul>	<b>Organizational Excellence</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelembagaan dan pemantapan kualitas layanan administratif dan teknis berstandar tinggi yang konsisten dan berorientasi pada kepuasan publik.</li></ul>
<b>Stakeholder Engagement Framework</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan kerangka keterlibatan publik dalam proses kebijakan DPRD</li><li>- Identifikasi kanal komunikasi efektif untuk partisipasi publik</li></ul>	<b>Inclusive Dialogue Platforms</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi platform komunikasi digital untuk partisipasi publik (<i>e-participation</i>)</li><li>- Sosialisasi secara luas model keterlibatan publik baru</li></ul>	<b>Digital Civic Engagement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan penuh platform digital interaktif untuk dialog publik dengan DPRD secara <i>real-time</i></li><li>- Integrasi feedback masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengawasan</li></ul>	<b>Sustained Public Involvement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi dampak kanal komunikasi publik dan platform partisipasi digital terhadap kualitas kebijakan DPRD</li><li>- Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis data analitik</li></ul>	<b>Participatory Governance Culture</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembudayaan partisipasi publik dalam seluruh siklus kebijakan DPRD secara berkelanjutan</li><li>- Institusionalisasi mekanisme keterlibatan publik</li></ul>
<b>Adaptive Governance Framework</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan kerangka tata kelola adaptif terhadap dinamika global dan lokal</li><li>- Penyusunan <i>roadmap</i> digitalisasi tata kelola internal</li></ul>	<b>Digital Governance Implementation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi transparansi dan akuntabilitas berbasis digital dalam pengelolaan organisasi</li><li>- Pelatihan adaptasi terhadap perubahan strategis bagi aparatur</li></ul>	<b>Integrated Risk Management</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem pengawasan internal dan eksternal</li><li>- Penerapan tata kelola berbasis elektronik (<i>e-governance</i>)</li></ul>	<b>Continuous Governance Improvement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi reguler tata kelola internal yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal</li><li>- Penyesuaian kebijakan internal secara berkala untuk meningkatkan responsivitas kelembagaan</li></ul>	<b>Institutionalized Adaptive Management</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Institusionalisasi budaya adaptif, transparansi, dan akuntabilitas secara menyeluruh</li><li>- Pelembagaan <i>good governance</i> sebagai prinsip tata kelola</li></ul>

Sumber: Sekretariat DPRD

Strategi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dirancang dengan pendekatan yang jelas dan terstruktur untuk memastikan kesinambungan dan pencapaian tujuan secara optimal dalam periode lima tahun. Strategi ini mengkombinasikan pendekatan praktik terbaik organisasi pemerintahan modern, serta fungsi kelembagaan Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung utama DPRD Provinsi DKI Jakarta.

**a. Tahun 2026 (Fondasi Awal)**

Tahun pertama strategi ini berfokus pada penyiapan fondasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang kuat melalui pemetaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kebutuhan nyata pelayanan kepada DPRD, serta Redesain Struktur Organisasi dan Tata Kerja agar mampu memberikan layanan administratif dan teknis secara efektif. Selain itu, dibangun kerangka keterlibatan publik dalam mendukung proses demokrasi yang inklusif dan kerangka tata kelola adaptif untuk menghadapi tantangan lokal dan global, termasuk Peta Jalan (*roadmap*) digitalisasi tata kelola internal yang transparan.

**b. Tahun 2027 (Akselerasi Pengembangan Pelayanan)**

Tahun kedua ditandai dengan akselerasi pengembangan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan bertaraf nasional dan penyempurnaan SOP administratif dan teknis guna mendukung optimalisasi fungsi DPRD. Secara paralel, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan platform komunikasi digital (*e-participation*) untuk memperluas partisipasi publik serta tata kelola organisasi yang berbasis teknologi digital guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

**c. Tahun 2028 (Integrasi Pelayanan Digital)**

Pada tahun ketiga, Sekretariat DPRD mengintegrasikan penuh sistem administrasi digital secara terpadu guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada DPRD. Dalam bidang partisipasi publik, dikembangkan platform digital interaktif secara penuh sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengawasan secara *real-time*. Sistem manajemen risiko digital terpadu juga diimplementasikan, disertai penguatan sistem monitoring audit internal dan eksternal secara *real-time*.

#### **d. Tahun 2029 (Penguatan Kolaborasi Publik)**

Fokus utama tahun keempat adalah evaluasi dan optimalisasi menyeluruh dari layanan administratif, teknis, dan partisipasi publik yang telah berjalan, didukung oleh manajemen kinerja berbasis teknologi. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi dampak platform digital terhadap partisipasi publik dan perumusan kebijakan DPRD, serta menyesuaikan kebijakan internal secara reguler agar kelembagaan Sekretariat DPRD tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika strategis yang terus berkembang.

#### **e. Tahun 2030 (Pemantapan Layanan Berkelanjutan)**

Pada tahun terakhir Renstra, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memfokuskan diri pada pelebagaan berbagai inisiatif strategis yang telah berhasil diimplementasikan dalam empat tahun sebelumnya. Hal ini mencakup pelebagaan standar pelayanan administratif dan teknis yang telah teruji secara konsisten, peningkatan partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan DPRD, serta pelebagaan budaya adaptif, transparan, dan akuntabel secara berkelanjutan.

Pendekatan strategis ini memastikan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, khususnya dalam memperkuat demokrasi lokal, mendorong partisipasi publik secara aktif, serta menjaga kebhinekaan dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif.

Adapun rencana arah transformasi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Dengan Penambahan Fungsi Baru;
2. *Re-profiling* SDM Melalui *Upskilling* dan *Reskilling* Jabatan Fungsional;
3. Implementasi *Matrix Structure* atau *Project-Based Team* Untuk Kegiatan Prioritas Tinggi;
4. Integrasi Sistem Informasi Kelembagaan Berbasis *Dashboard* Kinerja; dan
5. Perluasan Fungsi Bagian Humas dan Protokol menjadi Unit *Stakeholder Engagement & Global Relations*.

### **III.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dirancang sebagai implementasi strategis yang sejalan dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta konsisten dengan arah pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

Perumusan arah kebijakan ini memastikan adanya keselarasan yang kuat antara upaya Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut disajikan tabel arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029. Tabel ini merinci mengenai hubungan operasional antara arahan kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta dengan kebijakan strategis Sekretariat DPRD, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana kebijakan internal Sekretariat DPRD diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penyajian ini sekaligus memastikan keselarasan dan konsistensi antara kebijakan daerah dengan implementasi strategis organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Ket.
1	Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Optimalisasi reformasi birokrasi dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan manajemen Pemerintah Daerah yang akuntabel dan transparan	Peningkatan kualitas pelayanan administratif, teknis, dan operasional secara profesional dan berbasis teknologi, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung optimalisasi fungsi DPRD	-
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta pengawasan kebijakan publik yang inklusif	Penguatan partisipasi publik secara inklusif dan berkelanjutan dalam seluruh siklus pembentukan peraturan daerah dan pengawasan melalui pengembangan kanal komunikasi digital, sosialisasi kebijakan secara luas, serta forum dialog interaktif dengan masyarakat	-
3	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	Penerapan manajemen keuangan kelembagaan Sekretariat DPRD yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, melalui optimalisasi pengelolaan anggaran, monitoring evaluasi berbasis teknologi, serta tindak lanjut rekomendasi audit secara efektif dan tepat waktu	-
4	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan modern	Implementasi penuh dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam semua aspek pelayanan administrasi, teknis, serta proses partisipasi publik guna mendukung optimalisasi fungsi DPRD dan pelayanan publik	-
5	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Mendorong transformasi Jakarta sebagai daerah khusus yang berdaya saing global, berkelanjutan, dan inklusif melalui	Penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD sebagai elemen pendukung utama dalam implementasi kebijakan yang mendukung transformasi Jakarta menjadi Kota	-



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	Ket.
		peningkatan kualitas demokrasi lokal dan nilai-nilai kebhinekaan	Global yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif dengan menguatkan demokrasi lokal dan nilai kebhinekaan	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Dengan ditetapkannya arah kebijakan ini, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki pedoman yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai prioritas strategis selama lima tahun mendatang. Berikut ini deskripsi lebih lanjut 5 (lima) arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 - 2029 :

**1. Profesionalisme Layanan Berbasis Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka merealisasikan NSPK tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadopsi pendekatan yang memperkuat profesionalisme layanan administratif, teknis, dan operasional secara konsisten. Kebijakan ini diimplementasikan melalui pelatihan SDM berstandar nasional, digitalisasi sistem administrasi, serta evaluasi kinerja berbasis transparansi dan akuntabilitas.

**2. Partisipasi Publik yang Inklusif dan Terintegrasi**

Sejalan dengan prinsip penguatan perencanaan daerah, Sekretariat DPRD menerapkan pendekatan inklusif dalam proses kebijakan publik dengan memanfaatkan kanal komunikasi digital, sosialisasi luas, dan dialog interaktif yang terstruktur. Tujuan dari kebijakan ini adalah terciptanya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

**3. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan yang Optimal**

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, Sekretariat DPRD melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran yang terintegrasi dengan manajemen kinerja berbasis teknologi. Optimalisasi pengelolaan anggaran disertai dengan evaluasi berkala dan tindak lanjut audit secara efektif menjadi standar tata kelola Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.

**4. Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sekretariat DPRD menempatkan SPBE sebagai instrumen utama dalam mempercepat transformasi pelayanan yang efisien, transparan, dan berkualitas. Penerapan kebijakan ini mencakup semua aspek pelayanan administrasi, teknis, dan proses partisipasi publik yang diintegrasikan secara penuh dalam mendukung optimalisasi fungsi DPRD.



## 5. Penguatan Demokrasi Lokal dan Kebhinekaan Menuju Transformasi Kota Global

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kebijakan Sekretariat DPRD diarahkan untuk memperkuat demokrasi lokal, partisipasi publik, dan nilai kebhinekaan yang merupakan kunci dalam mendukung transformasi Jakarta sebagai Kota Global. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan yang adaptif terhadap tantangan strategis global dan lokal, memastikan Sekretariat DPRD mampu menjadi lembaga pendukung DPRD yang efektif dalam pencapaian pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui implementasi arah kebijakan strategis ini, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian RPJMD tetapi juga menjadi organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi, responsif terhadap dinamika lingkungan, serta secara aktif turut mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif sesuai visi pembangunan daerah.

### III.4 Penyusunan Pohon Kinerja Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Dalam mengelola kinerja organisasi pemerintahan modern, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan pengelolaan kinerja yang terstruktur, jelas, dan terukur. Untuk itu, penyusunan Pohon Kinerja dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 menjadi instrumen strategis yang fundamental, guna memastikan setiap langkah, kebijakan, dan intervensi organisasi secara jelas dapat terhubung dengan tujuan akhir (*ultimate outcome*) yang ingin dicapai.

Penyusunan Pohon Kinerja ini akan memberikan manfaat strategis berupa kejelasan hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja, sehingga mampu memastikan bahwa upaya Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta akan selalu konsisten, terukur, serta relevan terhadap tuntutan internal organisasi, ekspektasi publik, maupun arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.

Sebagai dasar dalam penyusunan Pohon Kinerja, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu merumuskan tujuan Rencana Strategis dengan mempertimbangkan secara matang isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut menggambarkan proses perumusan tujuan Renstra berdasarkan mandat yang jelas serta harapan strategis Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2025–2029.

Tabel 3.5 Merumuskan Tujuan Renstra PD berdasarkan Isu Strategis

Mandat (Dasar Hukum)	(Muatan Teknokratis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li><li>▪ UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKI Jakarta</li><li>▪ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li><li>▪ PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penguatan Fungsi DPRD (Fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan) secara Transparan dan Akuntabel</li><li>▪ Pengelolaan aspirasi masyarakat yang belum terintegrasi</li><li>▪ Penguatan struktur organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan DPRD dalam konteks transformasi global dan amanat UU Nomor 2 Tahun 2024</li><li>▪ Peningkatan kompetensi SDM dalam aspek digitalisasi dan analisis kebijakan strategis untuk mendukung DPRD</li><li>▪ Optimalisasi integrasi sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal dan eksternal</li><li>▪ Penguatan koordinasi antar lembaga strategis guna mendukung posisi strategis Jakarta sebagai Kota Global</li><li>▪ Penguatan kapasitas pengelolaan data strategis untuk mendukung pengambilan keputusan DPRD secara efektif</li><li>▪ Peningkatan responsivitas layanan administrasi dan protokol sesuai kebutuhan strategis DPRD</li><li>▪ Optimalisasi implementasi SPBE guna mendukung efektivitas tata kelola organisasi secara menyeluruh</li><li>▪ Penguatan konsistensi realisasi anggaran yang tinggi, efektif, dan optimal</li><li>▪ Penerapan aspek/konsep keberlanjutan dalam pengelolaan gedung kantor</li></ul>	Meningkatnya nilai demokrasi melalui penguatan kinerja lembaga legislatif secara efektif dan akuntabel
Harapan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Redesain Struktur Organisasi Sekretariat DPRD agar mampu memberikan layanan administratif dan teknis secara efektif</li><li>▪ Meningkatnya profesionalisme layanan Sekretariat DPRD</li><li>▪ Peningkatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah</li><li>▪ Penguatan kapasitas kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan strategis</li></ul>	

Sumber : Sekretariat DPRD

Selanjutnya, agar tujuan strategis dapat tercapai secara terukur dan efektif, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan sejumlah sasaran yang spesifik, relevan, dan terintegrasi. Melalui pendekatan *Critical Success Factors* (CSF), tabel berikut ini menyajikan sasaran Renstra yang diturunkan secara sistematis dari tujuan yang telah dirumuskan, dengan indikator kinerja yang terukur dan jelas.

Tabel 3.6 Merumuskan Sasaran Renstra Berdasarkan *Critical Success Factors* (CSF) Tujuan Renstra

(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra	Kondisi yang Diharapkan di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
Meningkatnya Nilai Demokrasi Melalui Penguatan Kinerja Lembaga Legislatif Secara Efektif dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang efektif dan akuntabel oleh DPRD dengan melibatkan <i>stakeholders</i> terkait</li> </ul>	1. Informasi dan publikasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal  2. Adanya dukungan SDM yang kompeten dan sistem proses pembahasan Raperda	Meningkatkan Efektivitas Fungsi pembentukan perda dan Pengawasan dalam Menyerap serta Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Secara Transparan dan Akuntabel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan teknis kepada DPRD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan yang Adaptif dan Komprehensif</li> </ul>	

Sumber: Sekretariat DPRD

Untuk memastikan sasaran strategis dapat tercapai secara nyata dalam implementasi operasional, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menyusun program-program spesifik yang menjadi prioritas selama periode Renstra. Tabel berikut secara rinci menyajikan identifikasi program Sekretariat DPRD beserta program pendukung dari perangkat daerah lainnya, yang secara strategis dirancang berdasarkan CSF dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.7 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan *Critical Success Factors* (CSF) Sasaran Renstra

<i>(Intermediate Outcome)</i> Sasaran Renstra	Kondisi yang Diharapkan di Akhir Renstra	<i>(Critical Success Factor)</i> Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah Lain
Meningkatkan Efektivitas Fungsi pembentukan perda dan Pengawasan dalam Menyerap serta Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Secara Transparan dan Akuntabel	▪ Terlaksananya pengelolaan aspirasi masyarakat yang terintegrasi, responsif dan terdigitalisasi	1. Pengelolaan aspirasi masyarakat secara digital melalui aplikasi yang terintegrasi  2. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan aspirasi  3. Adanya kesadaran dan komitmen DPRD dalam mendukung pengelolaan aspirasi masyarakat yang terintegrasi	▪ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	▪ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta)  ▪ Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta)
	▪ Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan teknis kepada DPRD	1. <b>Transformasi SDM</b> , melalui Penguatan kompetensi dan kapabilitas SDM untuk mendukung fungsi strategis Sekretariat DPRD dalam konteks digital dan global, serta Restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja.  2. <b>Transformasi Proses</b> , melalui Optimalisasi dan digitalisasi proses kerja dan manajemen risiko untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas layanan.  3. <b>Transformasi Sistem</b> , melalui Integrasi sistem dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan kolaborasi yang efektif.	▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	▪ Program Kepegawaian Daerah (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta)  ▪ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Provinsi DKI Jakarta)  ▪ Program Penyelenggaraan Pengawasan (Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)  ▪ Program Penataan Organisasi (Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta)  ▪ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta)

Sumber : Sekretariat DPRD

Ketiga tabel tersebut secara sistematis memberikan gambaran strategi Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang disusun untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Melalui pendekatan *Critical Success Factor (CSF)*, dapat dipastikan bahwa setiap program yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan aktual serta mampu mengatasi berbagai tantangan strategis yang dihadapi organisasi, baik dari segi kompetensi SDM, keterlibatan publik, maupun penguatan kapasitas kelembagaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, Pohon Kinerja Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam melaksanakan setiap langkah operasional, memastikan pencapaian *outcome* yang relevan, adaptif, dan mampu secara nyata mendukung Transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk nyata atas Pohon Kinerja Renstra Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD telah merumuskan strategi yang terarah pada setiap Subbagian, sehingga masing-masing unit kerja memiliki peran yang jelas dalam mendukung proses transformasi kebijakan. Strategi ini tidak hanya memperkuat tata kelola kelembagaan, tetapi juga memastikan bahwa arah transformasi yang ditempuh selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun rincian arah transformasi dimaksud dituangkan secara lebih detail dalam Lampiran dokumen Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, sehingga dapat menjadi pedoman teknis sekaligus instrumen pengendalian untuk mencapai target pembangunan daerah.



## BAB IV

# Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**D**alam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Tahun Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur, terstruktur, dan konsisten. Serangkaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dirancang secara sistematis merupakan respons langsung terhadap isu strategis seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, transparansi pengelolaan anggaran, dan penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan.

Berikut ini rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Sekretariat DPRD

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
T1.1	Tercapainya Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Megapolitan									Indeks Modal Manusia			
SS1.4	Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat									Indeks Demokrasi			
		T1	Meningkatnya nilai demokrasi melalui penguatan kinerja lembaga legislatif secara efektif dan akuntabel							Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Indonesia			
				S1.1	Meningkatkan efektivitas fungsi pembentukan perda dan pengawasan dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara transparan dan akuntabel					Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi			
						OC1.1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROG 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
								OT1.1.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	KEG 1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
											SUBKEG 1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
											SUBKEG 1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
								OT1.1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEG 1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
											SUBKEG 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
											SUBKEG 1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
											SUBKEG 1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
								OT1.1.1.3	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEG 1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
											SUBKEG 1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
								OT1.1.1.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KEG 1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
											SUBKEG 1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
								OT1.1.1.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEG 1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
											SUBKEG 1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
											SUBKEG 1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
											SUBKEG 1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
											SUBKEG 1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
											SUBKEG 1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
											SUBKEG 1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	
											SUBKEG 1.5.7	Penyediaan Bahan/Material	
											SUBKEG 1.5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
											SUBKEG 1.5.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
								OT1.1.1.6	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEG 1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
											SUBKEG 1.6.1	Pengadaan Mebel	
											SUBKEG 1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
											SUBKEG 1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
											SUBKEG 1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
								OT1.1.1.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG 1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
											SUBKEG 1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
											SUBKEG 1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
											SUBKEG 1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
											SUBKEG 1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
								OT1.1.1.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG 1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
											SUBKEG 1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
											SUBKEG 1.8.2	Pemeliharaan Mebel	
											SUBKEG 1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
											SUBKEG 1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
											SUBKEG 1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
											SUBKEG 1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
								OT1.1.1.9	Meningkatnya Kualitas Layanan Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan	KEG 1.9	Fasilitasi Keprotokolan	
											SUBKEG 1.9.1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
								OT1.1.1.10	Meningkatnya Kualitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	KEG 1.10	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
											SUBKEG 1.10.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
											SUBKEG 1.10.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
											SUBKEG 1.10.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
								OT1.1.1.11	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	KEG 1.11	Layanan Administrasi DPRD	
											SUBKEG 1.11.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
						OC1 .1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD			Nilai Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	PROG 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
								OT1.1.2.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	KEG 2.1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
										Jumlah Laporan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			
											SUBKEG 2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
											SUBKEG 2.1.2	Pembahasan Rancangan Perda	
											SUBKEG 2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
											SUBKEG 2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
											SUBKEG 2.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
								OT1.1.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	KEG 2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
										Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran			
											SUBKEG 2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	
											SUBKEG 2.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
											SUBKEG 2.2.3	Pembahasan APBD	
											SUBKEG 2.2.4	Pembahasan Perubahan APBD	
											SUBKEG 2.2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
								OT1.1.2.3	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	KEG 2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
										Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
											SUBKEG 2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
											SUBKEG 2.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
											SUBKEG 2.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
											SUBKEG 2.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
											SUBKEG 2.3.5	Pengawasan Penggunaan Anggaran	
											SUBKEG 2.3.6	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
								OT1.1.2.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	KEG 2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	
										Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD			
											SUBKEG 2.4.1	Orientasi DPRD	
											SUBKEG 2.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	
											SUBKEG 2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
											SUBKEG 2.4.3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
											SUBKEG 2.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	
											SUBKEG 2.4.5	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
								OT1.1.2.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	KEG 2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
										Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
											SUBKEG 2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	
											SUBKEG 2.5.2	Pelaksanaan Reses	
								OT1.1.2.6	Meningkatnya Kualitas Layanan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	KEG 2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
										Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		KET
											SUBKEG 2.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	
											SUBKEG 2.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	
								OT1.1.2.7	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah	KEG 2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	
										Persentase Kerjasama yang terfasilitasi			
											SUBKEG 2.7.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
											SUBKEG 2.7.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
								OT1.1.2.8	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	KEG 2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	
										Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD			
											SUBKEG 2.8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
											SUBKEG 2.8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
											SUBKEG 2.8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
											SUBKEG 2.8.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
											SUBKEG 2.8.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

Sumber: SIPJM Jakarta Tahun 2025-2029

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, dapat dirinci sebagai berikut:

### 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini dilaksanakan untuk menyediakan dukungan yang menyeluruh bagi kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPRD. Program ini mencakup fasilitasi kegiatan pembentukan peraturan daerah, pengawasan, serta anggaran, sekaligus memberikan layanan administratif, teknis, dan operasional yang diperlukan agar DPRD dapat menjalankan perannya secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Outcome* dari program ini adalah **Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD**, yang mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan. Indikator Kinerja Program ini yaitu **Nilai Kepuasan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, dengan target Nilai Persepsi 4, sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Pada Program ini terdapat 8 (delapan) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.

Adapun untuk Kegiatan pada Program ini yaitu:

- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7) Pembahasan Kerja Sama Daerah
- 8) Fasilitasi Tugas DPRD

Untuk Sub Kegiatan pada Program ini, yaitu:

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Perda
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 4) Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 6) Pembahasan KUA dan PPAS
- 7) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 8) Pembahasan APBD
- 9) Pembahasan Perubahan APBD

- 10) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 11) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 12) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 13) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 14) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 15) Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 16) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 17) Orientasi DPRD
- 18) Pendalaman Tugas DPRD
- 19) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 20) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- 21) Penyusunan Program Kerja DPRD
- 22) Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- 23) Kunjungan Kerja dalam Daerah
- 24) Pelaksanaan Reses
- 25) Penyusunan Kode Etik DPRD
- 26) Pengawasan Kode Etik DPRD
- 27) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
- 28) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 29) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 30) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- 31) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- 32) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- 33) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya dukungan teknis, administratif, dan operasional yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara optimal. Program ini memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, layanan administrasi, serta pemeliharaan aset daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. *Outcome* dari program ini adalah **Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, yang mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan Indikator Kinerja yaitu **Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan target Nilai Persepsi 4, sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta



Tahun 2025-2029. Pada Program ini terdapat 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan.

Adapun Kegiatan pada Program ini, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Fasilitasi Keprotokolan
- 10) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- 11) Layanan Administrasi DPRD

Selanjutnya Sub Kegiatan pada Program ini, yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 5) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 7) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 14) Penyediaan Bahan/Material
- 15) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 17) Pengadaan Mebel
- 18) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 19) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 20) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 21) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 22) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 23) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 24) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 25) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 26) Pemeliharaan Mebel
- 27) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 28) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 29) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 30) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 31) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- 32) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 33) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 34) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD
- 35) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Daftar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun turut memuat target kinerja hingga tahun 2030 sebagai acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2030. Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dijalankan dapat terarah, terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Untuk pendanaan serta target kinerja Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SEKRETARIAT DPRD	Tujuan: Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Indonesia	36.84%	36.9%	817,252,387,246	36.95%	717,442,526,146	37.00%	739,962,432,440	37.00%	762,482,338,733	37.1%	785,002,245,027	
	Sasaran: Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi	100%	100%		100%		100%		100%				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	405,139,401,065	4	408,489,322,327	4	399,747,902,599	4	472,233,486,148	4	426,921,876,774	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	464,604,328	100	511,064,761	100	562,171,237	100	618,388,361	100	680,227,196	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	11	411,401,250	10	452,541,375	10	497,795,513	10	547,575,064	10	602,332,570	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	53,203,078	4	58,523,386	4	64,375,724	4	70,813,297	4	77,894,626	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	4	56,432,240,918	4	59,296,893,184	4	59,396,258,869	4	62,418,596,938	4	62,538,829,416	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	120	55,486,396,515	120	58,260,716,341	120	58,260,716,341	120	61,173,752,158	120	61,173,752,158	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	42,520,000	4	42,520,000	4	42,520,000	4	42,520,000	4	42,520,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	903,324,403	4	993,656,843	4	1,093,022,528	4	1,202,324,780	4	1,322,557,258	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	4	611,401,549	4	672,541,704	4	739,795,874	4	887,755,049	4	976,530,554	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	611,401,549	2	672,541,704	2	739,795,874	2	887,755,049	2	976,530,554	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4	1,593,319,204	4	796,659,602	4	1,593,319,204	4	1,672,985,164	4	836,492,582	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	1,593,319,204	1	796,659,602	1	1,593,319,204	1	1,672,985,164	1	836,492,582	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	30,157,599,079	4	33,094,734,987	4	36,404,208,486	4	39,958,142,932	4	43,953,957,227	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	727,959,907	1	800,755,898	1	880,831,487	1	968,914,636	1	1,065,806,100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	4,960,502,877	1	5,456,553,165	1	6,002,208,481	1	6,602,429,329	1	7,262,672,262	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1,551,957,418	1	1,707,153,160	1	1,877,868,476	1	2,065,655,323	1	2,272,220,856	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4	4,954,558,622	4	5,450,014,484	4	5,995,015,933	4	6,594,517,526	4	7,253,969,278	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	4	2,757,908,904	4	3,033,699,794	4	3,337,069,774	4	3,670,776,751	4	4,037,854,426	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13	13	154,681,551	13	170,149,706	13	187,164,677	13	205,881,144	13	226,469,259	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	1,172,727,720	1	1,290,000,492	1	1,419,000,541	1	1,560,900,595	1	1,716,990,655	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	786,240,000	4	786,240,000	4	864,864,000	4	864,864,000	4	951,350,400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	13,091,062,080	4	14,400,168,288	4	15,840,185,117	4	17,424,203,628	4	19,166,623,991	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	14,014,722,786	4	11,458,402,599	4	12,227,505,724	4	15,876,646,085	4	13,429,940,309	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	10,447,759,241	1	7,534,742,699	1	7,911,479,834	1	10,284,923,784	1	7,534,742,699	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	500	366	3,251,073,366	366	3,576,180,703	366	3,933,798,773	366	5,113,938,405	366	5,369,635,325	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	5	94.767.054	2	104.243.759	2	114.668.135	2	126.134.948	2	138.748.443	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	10	221.123.125	1	243.235.438	1	267.558.982	1	351.648.948	1	386.813.842	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	72,275,340,914	4	75,976,122,641	4	79,870,644,923	4	83,969,464,934	4	88,283,754,722	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	438,588,438	12	482,447,282	12	530,692,010	12	583,761,211	12	642,137,332	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	9,426,782,225	12	9,898,121,336	12	10,393,027,403	12	10,912,678,773	12	11,458,312,712	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	4	1,301,705,194	4	1,431,875,713	4	1,575,063,285	4	1,732,569,613	4	1,905,826,575	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	61,108,265,057	12	64,163,678,310	12	67,371,862,225	12	70,740,455,337	12	74,277,478,103	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	49,445,118,283	4	40,560,280,431	4	23,398,501,833	4	79,587,122,297	4	27,521,562,526	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	41	1,539,999,484	41	1,693,999,432	41	1,863,399,376	41	2,049,739,313	41	2,254,713,245	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	66	66	102,141,201	66	112,355,321	66	123,590,853	66	135,949,939	66	149,544,932	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	771	807	1,561,124,126	807	1,717,236,539	807	1,888,960,192	807	2,077,856,212	807	2,285,641,833	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	36,047,593,800	3	25,823,003,499	3	7,187,497,209	3	61,755,017,209	3	7,906,246,930	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50	50	8,900,595,425	50	9,790,654,968	50	10,769,720,464	50	11,846,692,511	50	13,031,361,762	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	622	622	1,293,664,247	622	1,423,030,672	622	1,565,333,739	622	1,721,867,113	622	1,894,053,824	
Fasilitasi Keprotokolan	Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan	4	4	7,556,516,040	4	11,580,135,237	4	10,068,832,029	4	10,572,273,630	4	11,100,887,312	
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	17	17	7,556,516,040	17	11,580,135,237	17	10,068,832,029	17	10,572,273,630	17	11,100,887,312	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4	4	169,013,060,792	4	170,609,462,292	4	171,160,337,042	4	171,913,150,642	4	172,364,838,802	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	106	106	163,815,393,292	106	165,100,714,792	106	165,100,714,792	106	165,100,714,792	106	165,100,714,792	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1	1	3,110,800,000	1	3,421,880,000	1	3,764,068,000	1	4,516,881,600	1	4,968,569,760	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	106	106	2,086,867,500	106	2,086,867,500	106	2,295,554,250	106	2,295,554,250	106	2,295,554,250	
Layanan Administrasi DPRD	Nilai Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	4	4	3,575,477,172	4	3,933,024,889	4	4,326,327,378	4	4,758,960,116	4	5,234,856,128	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1	1	3,575,477,172	1	3,933,024,889	1	4,326,327,378	1	4,758,960,116	1	5,234,856,128	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Nilai Kepuasan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4	4	412,112,986,181	4	308,953,203,819	4	340,214,529,841	4	290,248,852,585	4	358,080,368,253	
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	4	4	2,779,911,878	4	2,779,911,878	4	3,057,903,066	4	3,122,903,066	4	3,419,133,372	
	Jumlah Laporan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1	1		1		1		1		1		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	642,972,000	1	642,972,000	1	707,269,200	1	707,269,200	1	777,996,120	
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1	1	1,726,752,378	1	1,726,752,378	1	1,899,427,616	1	1,899,427,616	1	2,089,370,377	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	1	158,187,500	1	158,187,500	1	174,006,250	1	174,006,250	1	191,406,875	
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	1	252,000,000	1	252,000,000	1	277,200,000	1	277,200,000	1	360,360,000	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0	0	-	0	-	0	-	1	65,000,000	0	-	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	4	4	1,545,130,000	4	995,720,000	4	995,720,000	4	995,720,000	4	995,720,000	
	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	1	1		1		1		1		1		
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	1,506,130,000	1	956,720,000	1	956,720,000	1	956,720,000	1	956,720,000	
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4	4	121,807,452,032	4	94,080,879,616	4	107,922,897,024	4	80,077,086,680	4	114,865,174,528	
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1	1		1		1		1		1		
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24	24	24,179,083,912	24	18,677,656,456	24	21,428,370,184	20	15,911,747,380	24	22,803,727,048	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24	24	25,231,316,384	24	19,467,916,192	24	22,349,616,288	20	16,570,297,160	24	23,790,466,336	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24	24	27,433,581,328	24	21,188,773,264	24	24,289,908,496	20	17,985,196,720	24	25,861,744,912	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24	24	25,231,316,384	24	19,467,916,192	24	22,349,616,288	20	16,570,297,160	24	23,790,466,336	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	24	24	19,725,654,024	24	15,272,117,512	24	17,498,885,768	20	13,033,048,260	24	18,612,269,896	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	1	6,500,000	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	4	4	41,683,348,452	4	44,010,626,136	4	46,825,219,700	4	50,905,616,753	4	53,325,187,461	
	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	1	1		1		1		1		1		
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	0	0	0	0	0	1	984,897,583	0	0	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	9,376,745,600	6	10,314,420,160	6	11,345,862,176	6	12,480,448,394	6	13,728,493,233	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	30	4,595,500,000	30	4,595,500,000	30	4,595,500,000	30	4,595,500,000	30	4,595,500,000	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	9	1,358,500,000	9	1,358,500,000	9	1,358,500,000	9	1,358,500,000	9	1,358,500,000	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	442,761,936	1	221,380,968	1	232,450,016	1	244,072,517	1	256,276,143	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	9	12	25,909,840,916	12	27,520,825,008	12	29,292,907,508	12	31,242,198,259	12	33,386,418,085	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4	4	148,175,140,441	4	76,477,436,692	4	79,059,811,823	4	52,768,137,033	4	81,748,463,412	
	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1	1		1		1		1		1		
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	12	3,740,935,465	12	4,115,029,012	12	4,526,531,913	12	4,526,531,913	12	4,979,185,104	
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	106	106	144,434,204,976	106	72,362,407,680	106	74,533,279,910	106	48,241,605,120	106	76,769,278,308	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4	4	468,570,000	4	1,450,998,500	4	1,455,298,425	4	1,528,063,346	4	1,604,466,514	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1	1		1		1		1		1		
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0	0	1	65,000,000	0	0	0	0	0	0	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12	4	468,570,000	4	1,385,998,500	4	1,455,298,425	4	1,528,063,346	4	1,604,466,514	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah	4	4	4,318,702,632	4	4,600,763,215	4	4,907,284,615	4	5,240,619,281	4	5,603,352,570	
	Persentase Kerjasama yang terfasilitasi	100	100		100		100		100		100		
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	4	1,997,462,400	4	2,047,398,960	4	2,098,583,934	4	2,151,048,532	4	2,204,824,746	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	12	2,321,240,232	12	2,553,364,255	12	2,808,700,681	12	3,089,570,749	12	3,398,527,824	
Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	4	4	91,334,730,746	4	84,556,867,782	4	95,990,395,188	4	95,610,706,426	4	96,518,870,396	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	72	73	73,166,774,165	73	65,476,010,464	73	75,950,541,805	73	74,706,107,494	73	74,563,048,149	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	0	1	90,058,150	1	99,063,965	1	108,970,362	1	119,867,398	1	131,854,137	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	3	564,293,000	3	592,507,650	3	622,133,033	3	622,133,033	3	653,239,684	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3	2	15,489,315,431	2	16,263,781,203	2	17,076,970,263	2	17,930,818,776	2	18,827,359,715	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5	5	2,024,290,000	5	2,125,504,500	5	2,231,779,725	5	2,231,779,725	5	2,343,368,711	

Sumber: SIPJM Jakarta Tahun 2025-2029

Selanjutnya, berkaitan dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Sasaran RPJMD yaitu Menguatnya Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebhinekaan Masyarakat, tidak termasuk kedalam 2 (dua) Program yang digunakan di Sekretariat DPRD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat Sub Kegiatan Prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tetap berkontribusi pada keberlangsungan fungsi pemerintahan secara umum.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD pada periode 2025–2029. IKU berperan sebagai alat ukur yang terstruktur dan terarah, sehingga mampu menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program serta memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Indonesia	%	36,84	36,9	36,95	37	37	37,1	-
2	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi	%	100	100	100	100	100	100	-

Sumber: SIPJM Jakarta Tahun 2025-2029

Pada Aspek pelayanan umum, Indikator Kinerja Kunci (IKK) diwakilkan oleh indikator Tujuan dan Sasaran Renstra, sehingga untuk IKK Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Indikator Kinerja Lembaga Legislatif dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Indeks Demokrasi Indonesia	%	36,84	36,9	36,95	37	37	37,1	-
2	Nilai Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dalam Aspek Kesetaraan pada Indeks Demokrasi	%	100	100	100	100	100	100	-

Sumber: SIPJM Jakarta Tahun 2025-2029

## BAB V

# Penutup





# BAB V

## PENUTUP

**R**enstra Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dirancang secara strategis sebagai pedoman utama dalam mendukung DPRD untuk menjalankan fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Berlandaskan visi dan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta serta analisis strategis lingkungan internal dan eksternal, dokumen ini merinci sasaran strategis, indikator kinerja yang terukur, serta strategi pencapaiannya. Kesimpulan utama dari dokumen ini menegaskan perlunya Sekretariat DPRD meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi dan teknis, serta mendorong partisipasi publik secara inklusif guna memperkuat fungsi demokrasi lokal dalam kerangka transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif dan Peningkatan kualitas layanan legislatif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan strategi yang telah dirancang, terdapat kaidah pelaksanaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan internal di Sekretariat DPRD. Prinsip-prinsip utama yang harus ditegakkan mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kolaborasi lintas-unit kerja, serta pemanfaatan inovasi teknologi secara konsisten. Dengan mengadopsi kaidah tersebut, implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan akan terlaksana secara disiplin, sistematis, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Sebagai bagian dari prinsip manajemen strategis, mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi Renstra dilaksanakan secara periodik melalui monitoring dan evaluasi yang berbasis bukti (*evidence-based evaluation*). Evaluasi akan dilakukan melalui pemantauan rutin terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta analisis kualitatif terhadap relevansi pelaksanaan strategi dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi yang sistematis dan obyektif akan menjadi fondasi dalam mengambil keputusan strategis guna melakukan penyesuaian maupun penguatan terhadap pelaksanaan program, sehingga Sekretariat DPRD mampu secara proaktif mengantisipasi tantangan dan dinamika yang terjadi.

Dengan demikian, proses evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang strategis dan integratif, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat terus berkembang sebagai institusi pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan responsif, serta memberikan dampak nyata dalam memperkuat tata kelola demokrasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta.



# Lampiran



# ARAH TRANSFORMASI

---

**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

# EXECUTIVE SUMMARY

## 🎯 Tujuan Transformasi

Memperkuat kapasitas Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi legislatif melalui transformasi strategis yang komprehensif dan berkelanjutan.

## 📈 Pendekatan Strategis

Mengintegrasikan transformasi digital, penguatan kompetensi SDM, dan optimalisasi proses kerja untuk meningkatkan efektivitas layanan Sekretariat DPRD.

## 📋 Fokus Implementasi

Transformasi dilakukan pada 12 area fungsional dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing area.

## 🏆 Hasil yang Diharapkan

Sekretariat DPRD yang responsif, adaptif, dan mampu memberikan dukungan strategis berkualitas tinggi dalam konteks transformasi Jakarta sebagai Kota Global.



# KERANGKA TRANSFORMASI

Kerangka transformasi yang komprehensif ini dirancang untuk memastikan perubahan yang sistematis dan berkelanjutan pada seluruh aspek Sekretariat DPRD, dengan mempertimbangkan konteks Jakarta sebagai Kota Global.



## Transformasi SDM

Penguatan kompetensi dan kapabilitas SDM untuk mendukung fungsi strategis Sekretariat DPRD dalam konteks digital dan global.

## Transformasi Proses

Optimalisasi dan digitalisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas layanan.

## Transformasi Sistem

Integrasi sistem dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan kolaborasi yang efektif.

# ARAH TRANSFORMASI PERLENGKAPAN

*"Transformasi Ruang, Transformasi Kinerja"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Pengelolaan Aset	Sistem inventarisasi manual dan terfragmentasi	Implementasi sistem pengelolaan aset terintegrasi berbasis digital	Peningkatan akurasi data aset dan efisiensi pengelolaan
Ruang Kerja	Tata ruang konvensional dengan pemanfaatan ruang yang belum optimal	Redesain ruang kerja yang mendukung kolaborasi dan produktivitas	Peningkatan produktivitas dan kepuasan pengguna ruang
Operasional	Proses operasional manual dengan respons lambat	Penerapan SOP yang lebih efisien dan responsif dalam pengelolaan perlengkapan	Peningkatan kecepatan layanan dan kepuasan pengguna
Keberlanjutan	Belum ada integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengadaan dan pengelolaan	Adopsi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengadaan dan pengelolaan perlengkapan	Pengurangan jejak karbon dan peningkatan efisiensi sumber daya



# ARAH TRANSFORMASI PERLENGKAPAN

## "Transformasi Ruang, Transformasi Kinerja"

### Modernisasi Pengelolaan Aset

Implementasi sistem pengelolaan aset terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perlengkapan DPRD.

### Optimalisasi Ruang Kerja

Redesain ruang kerja yang mendukung kolaborasi dan produktivitas dengan memperhatikan aspek ergonomis dan teknologi pendukung.

### Peningkatan Efisiensi Operasional

Penerapan standar operasional prosedur yang lebih efisien dan responsif dalam pengelolaan perlengkapan untuk mendukung kinerja DPRD.

### Implementasi Konsep Berkelanjutan

Adopsi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengadaan dan pengelolaan perlengkapan untuk mendukung visi Jakarta sebagai Kota Cerdas dan Berkelanjutan.



#### Fokus Area Transformasi



Sistem Inventarisasi Digital



Integrasi Proses Kerja



# ARAH TRANSFORMASI KERUMAHTANGGAAN

*"Kerumahtanggaan andal, rumah demokrasi terjaga"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Pengelolaan Fasilitas	Pengelolaan fasilitas berbasis manual dengan respons lambat	Implementasi sistem pengelolaan fasilitas berbasis teknologi	Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan fasilitas
Keamanan	Sistem keamanan terfragmentasi dan belum terintegrasi	Pengembangan sistem keamanan terintegrasi dengan teknologi modern	Peningkatan keamanan dan perlindungan aset DPRD
Keberlanjutan Lingkungan	Belum ada implementasi praktik ramah lingkungan secara sistematis	Penerapan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan kerumahtanggaan	Pengurangan jejak karbon dan peningkatan efisiensi energi
Manajemen Layanan	Layanan reaktif dengan sistem monitoring terbatas	Pengembangan sistem manajemen layanan yang responsif dan proaktif	Peningkatan kepuasan pengguna dan efisiensi operasional



# ARAH TRANSFORMASI KERUMAHTANGGAAN

*"Kerumahtanggaan andal, rumah demokrasi terjaga"*

## **Pengelolaan Fasilitas Modern**

Implementasi sistem pengelolaan fasilitas berbasis teknologi untuk memastikan kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja DPRD secara berkelanjutan.

## **Keamanan Terintegrasi**

Pengembangan sistem keamanan terintegrasi yang menggabungkan teknologi dan protokol keamanan untuk melindungi aset dan aktivitas DPRD.

## **Keberlanjutan Lingkungan**

Penerapan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan kerumahtanggaan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi energi.

## Profil Transformasi Kerumahtanggaan



## **Manajemen Layanan Responsif**

Pengembangan sistem manajemen layanan yang responsif untuk memastikan kebutuhan operasional DPRD terpenuhi dengan cepat dan efektif.

# ARAH TRANSFORMASI TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

*"Satu Pintu Kepegawaian & Tata Usaha: Cepat, Akurat, Akuntabel"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Sistem Administrasi	Sistem administrasi terfragmentasi dan berbasis kertas	Mengembangkan sistem administrasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses tata usaha dan kepegawaian	Peningkatan efisiensi dan akurasi layanan administrasi
Manajemen SDM	Pengelolaan SDM konvensional dengan pengembangan kompetensi terbatas	Implementasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang mendukung pengembangan karir	Peningkatan kinerja dan kepuasan pegawai Sekretariat DPRD
Pengelolaan Dokumen	Pengelolaan dokumen berbasis kertas dengan akses terbatas	Transformasi pengelolaan dokumen dari berbasis kertas menjadi digital	Percepatan proses administrasi dan peningkatan aksesibilitas informasi
Layanan Kepegawaian	Layanan kepegawaian yang reaktif dengan proses manual	Pengembangan layanan kepegawaian satu pintu yang terintegrasi dan responsif	Peningkatan kepuasan pegawai dan efisiensi proses kepegawaian

# ARAH TRANSFORMASI TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

## *Satu Pintu Kepegawaian & Tata Usaha: Cepat, Akurat, Akuntabel*

### Integrasi Sistem Administrasi

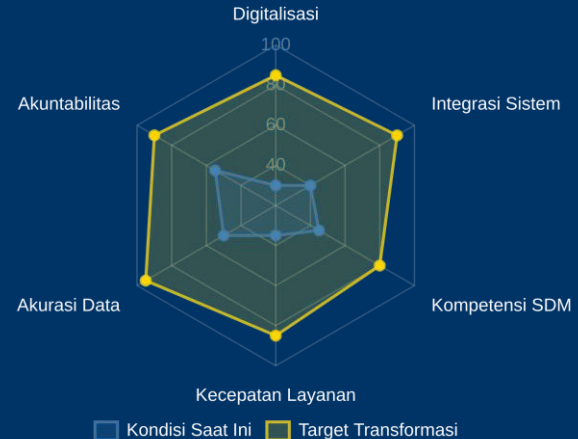
Mengembangkan sistem administrasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses tata usaha dan kepegawaian untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

### Penguatan Manajemen SDM

Implementasi sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang mendukung pengembangan karir dan peningkatan kinerja pegawai Sekretariat DPRD.

### Digitalisasi Dokumen

Transformasi pengelolaan dokumen dari berbasis kertas menjadi digital untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi.



### Indikator Kinerja Utama



Kecepatan Layanan



Akurasi Data



Akuntabilitas

# ARAH TRANSFORMASI PERSIDANGAN DAN RISALAH

## "Layanan Persidangan: Profesional dan Responsif"

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Proses Persidangan	Pengelolaan jadwal dan materi persidangan manual dengan koordinasi terbatas	Implementasi sistem digital terintegrasi untuk pengelolaan jadwal, dokumentasi, dan distribusi materi persidangan	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan persidangan
Dokumentasi Risalah	Penyusunan risalah manual dengan waktu pemrosesan lama	Penerapan teknologi pengenalan suara dan AI untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan penyusunan risalah	Peningkatan kualitas dan kecepatan produksi risalah persidangan
Kompetensi Staf	Pengembangan kapasitas staf terbatas dan tidak terstruktur	Program pengembangan kapasitas staf dalam manajemen persidangan modern dan teknik dokumentasi	Peningkatan profesionalisme dan kualitas layanan persidangan
Monitoring Kinerja	Evaluasi kinerja layanan persidangan belum sistematis dan berbasis data	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja layanan persidangan berbasis KPI	Peningkatan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan layanan persidangan

# ARAH TRANSFORMASI PERSIDANGAN DAN RISALAH

## Layanan Persidangan: Profesional dan Responsif



### Digitalisasi Proses Persidangan

Implementasi sistem digital terintegrasi untuk pengelolaan jadwal, dokumentasi, dan distribusi materi persidangan secara efisien.



### Peningkatan Kualitas Risalah

Penerapan teknologi pengenalan suara dan AI untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan penyusunan risalah persidangan.



### Penguatan Kompetensi Staf

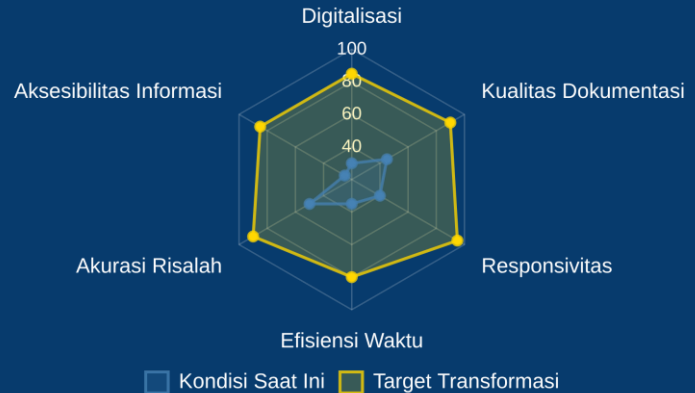
Program pengembangan kapasitas staf dalam manajemen persidangan modern dan teknik dokumentasi yang efektif.



### Monitoring Kinerja Layanan

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja layanan persidangan berbasis KPI yang terukur.

### Transformasi Layanan Persidangan dan Risalah



# ARAH TRANSFORMASI PRODUK HUKUM DAN PENGAJIAN

*"A Credible Pillar of Legislative Governance"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Kapasitas Analisis Hukum	Kapasitas analisis terbatas dengan metodologi konvensional	Penguatan kapasitas analisis dan pengkajian produk hukum berbasis bukti	Peningkatan kualitas dan efektivitas produk hukum DPRD
Basis Data Hukum	Basis data hukum terfragmentasi dan akses terbatas	Pengembangan sistem basis data hukum terintegrasi yang mudah diakses	Aksesibilitas informasi hukum yang lebih baik bagi anggota DPRD dan publik
Kolaborasi Multi-stakeholder	Kolaborasi terbatas dan tidak terstruktur	Memperkuat kerja sama dengan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil	Peningkatan legitimasi dan kualitas produk hukum melalui partisipasi multi-stakeholder
Standardisasi Proses	Proses pengkajian dan penyusunan produk hukum belum terstandarisasi	Pengembangan standar dan metodologi pengkajian produk hukum yang sistematis	Penguatan peran Sekretariat DPRD sebagai pilar tata kelola legislatif

# ARAH TRANSFORMASI PRODUK HUKUM DAN PENGKAJIAN

## "A Credible Pillar of Legislative Governance"

### Penguatan Kapasitas Analisis Hukum

Meningkatkan kemampuan analisis dan pengkajian produk hukum untuk mendukung pengambilan keputusan legislatif yang berkualitas dan berbasis bukti.

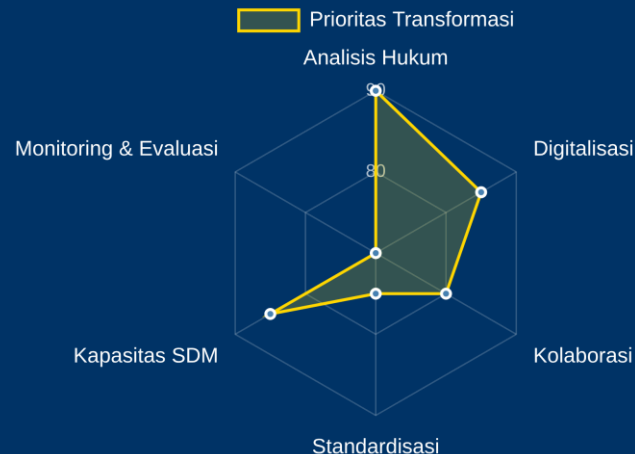
### Digitalisasi Basis Data Hukum

Mengembangkan sistem basis data hukum terintegrasi yang mudah diakses untuk mendukung proses legislasi dan pengawasan yang efektif.

### Kolaborasi Multi-stakeholder

Memperkuat kerja sama dengan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas produk hukum dan pengkajian.

### Area Prioritas Transformasi



### Hasil yang Diharapkan



Peningkatan kualitas dan efektivitas produk hukum DPRD



Aksesibilitas informasi hukum yang lebih baik bagi anggota DPRD dan publik



Penguatan peran Sekretariat DPRD sebagai pilar tata kelola legislatif



# ARAH TRANSFORMASI KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

## *"Meaningful and Impactful Parliamentary Study & Partnership"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Jaringan Strategis	Kerjasama terbatas dan belum terstruktur dengan lembaga legislatif lain	Membangun dan memperkuat jaringan kerjasama strategis dengan lembaga legislatif nasional dan internasional	Peningkatan kapasitas DPRD melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik
Kolaborasi Akademis	Kerjasama dengan perguruan tinggi bersifat ad-hoc dan terbatas	Mengembangkan kerjasama sistematis dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Peningkatan kualitas kajian dan analisis kebijakan berbasis riset
Diplomasi Parlemen	Peran diplomasi parlemen daerah belum optimal	Memperkuat peran DPRD dalam diplomasi parlemen daerah untuk mendukung visi Jakarta sebagai Kota Global	Peningkatan pengaruh dan visibilitas DPRD dalam forum regional dan internasional
Partisipasi Publik	Mekanisme partisipasi publik terbatas dan kurang efektif	Mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang efektif melalui kerjasama dengan masyarakat sipil	Peningkatan legitimasi dan kualitas kebijakan DPRD melalui keterlibatan publik

# ARAH TRANSFORMASI KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

## "Meaningful and Impactful Parliamentary Study & Partnership"



### Penguatan Jaringan Strategis

Membangun dan memperkuat jaringan kerjasama strategis dengan lembaga legislatif nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan kapasitas DPRD.



### Kolaborasi Akademis

Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan kualitas kajian dan analisis kebijakan DPRD.



### Diplomasi Parlemen Daerah

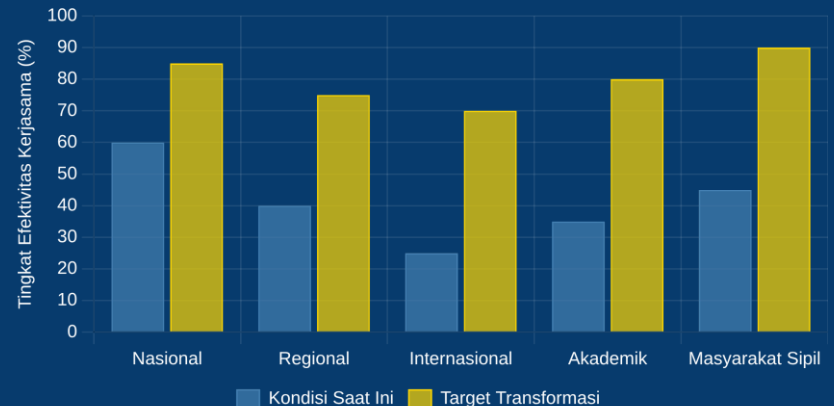
Memperkuat peran DPRD dalam diplomasi parlemen daerah untuk mendukung visi Jakarta sebagai Kota Global yang berpengaruh.



### Partisipasi Publik

Mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang efektif dalam proses legislasi dan pengawasan DPRD melalui kerjasama dengan masyarakat sipil.

Efektivitas Kerjasama Antar Lembaga



Fokus Kerjasama Strategis



Lembaga Pemerintah



Institusi Akademik

# ARAH TRANSFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN

*"Transforming Strategy to Impact, Transforming Budget to Value"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Perencanaan Strategis	Perencanaan berbasis input dengan integrasi terbatas antara tujuan dan alokasi sumber daya	Implementasi sistem perencanaan berbasis kinerja yang mengintegrasikan tujuan strategis, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya	Peningkatan efektivitas pencapaian tujuan strategis dan optimalisasi penggunaan sumber daya
Analitik Data	Penggunaan data terbatas dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran	Penerapan analitik data untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, monitoring realisasi, dan evaluasi dampak program	Pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran
Siklus Perencanaan	Siklus perencanaan kaku dengan kemampuan adaptasi terbatas	Pengembangan siklus perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan prioritas strategis	Peningkatan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan dan prioritas DPRD
Kolaborasi	Keterlibatan pemangku kepentingan terbatas dalam proses perencanaan dan penganggaran	Penguatan mekanisme kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kualitas dan legitimasi perencanaan dan penganggaran

# ARAH TRANSFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN

*"Transforming Strategy to Impact, Transforming Budget to Value"*



## Perencanaan Berbasis Kinerja

Implementasi sistem perencanaan berbasis kinerja yang mengintegrasikan tujuan strategis, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya secara efektif.



## Analitik Data Anggaran

Penerapan analitik data untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, monitoring realisasi, dan evaluasi dampak program.



## Siklus Perencanaan Adaptif

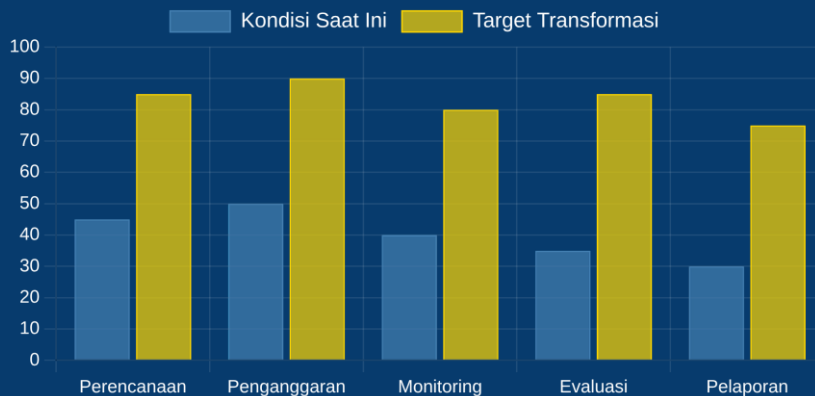
Pengembangan siklus perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan prioritas strategis DPRD.



## Kolaborasi Multi-stakeholder

Penguatan mekanisme kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi.

Tingkat Maturitas Proses Perencanaan dan Anggaran (%)



## Nilai Tambah Transformasi



Peningkatan efektivitas alokasi anggaran sesuai prioritas strategis



Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran



Pengambilan keputusan berbasis data dalam proses perencanaan

# ARAH TRANSFORMASI TATA USAHA KEUANGAN

*"Strengthening Financial Discipline, Delivering Institutional Integrity"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Sistem Keuangan	Sistem keuangan terfragmentasi dengan integrasi terbatas	Mengembangkan sistem keuangan terintegrasi yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Peningkatan akurasi dan efisiensi pengelolaan keuangan
Tata Kelola	Standar dan prosedur keuangan belum sepenuhnya terstandarisasi	Implementasi standar dan prosedur keuangan yang lebih ketat sesuai praktik terbaik	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran
Pelaporan	Sistem pelaporan manual dengan waktu pemrosesan yang lama	Pengembangan sistem pelaporan keuangan yang komprehensif dan real-time	Pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan data keuangan
Kepatuhan	Monitoring kepatuhan reaktif dengan risiko ketidakpatuhan	Penerapan sistem monitoring kepatuhan proaktif dengan peringatan dini	Minimalisasi risiko ketidakpatuhan dan peningkatan integritas keuangan

# ARAH TRANSFORMASI TATA USAHA KEUANGAN

*"Strengthening Financial Discipline, Delivering Institutional Integrity"*

## Integrasi Sistem Keuangan

Mengembangkan sistem keuangan terintegrasi yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan keuangan.

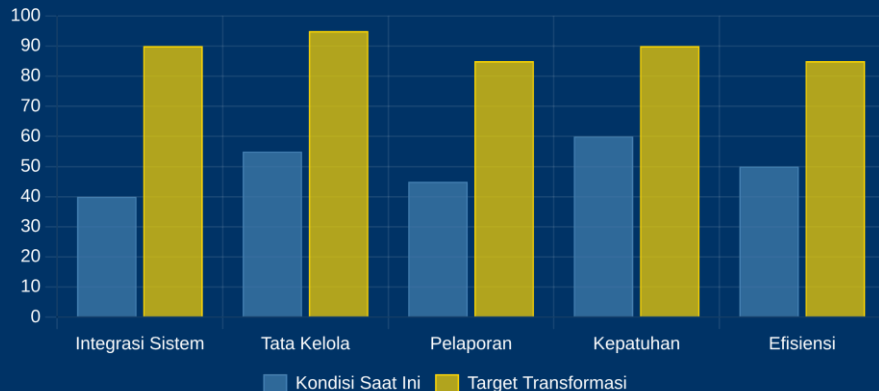
## Penguatan Tata Kelola Keuangan

Implementasi standar dan prosedur keuangan yang lebih ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD.

## Optimalisasi Pelaporan Keuangan

Pengembangan sistem pelaporan keuangan yang lebih komprehensif dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

Profil Transformasi Keuangan



## Prinsip Utama Transformasi Keuangan



Akuntabilitas



Transparansi



Kepatuhan



Efisiensi

# ARAH TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN

*"Akurat dalam Proses, Akuntabel dalam Hasil"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Proses Perbendaharaan	Proses perbendaharaan manual dengan risiko kesalahan tinggi	Implementasi sistem otomatisasi proses perbendaharaan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi	Pengurangan kesalahan proses dan peningkatan efisiensi operasional
Sistem Verifikasi	Verifikasi satu lapis dengan kontrol terbatas	Pengembangan sistem verifikasi multi-layer yang terintegrasi untuk memastikan kepatuhan	Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pengelolaan keuangan publik
Analitik Keuangan	Analisis keuangan manual dengan pelaporan berkala	Penerapan sistem analitik keuangan real-time untuk monitoring arus kas dan realisasi anggaran	Pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat
Kapasitas SDM	Pengembangan kompetensi SDM terbatas dan tidak terstruktur	Program pengembangan kompetensi SDM perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan modern	Peningkatan profesionalisme dan kapasitas staf perbendaharaan

# ARAH TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN

*"Akurat dalam Proses, Akuntabel dalam Hasil"*



## Otomatisasi Proses Perbendaharaan

Implementasi sistem otomatisasi proses perbendaharaan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan.



## Penguatan Sistem Verifikasi

Pengembangan sistem verifikasi multi-layer yang terintegrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pengelolaan keuangan publik.



## Analitik Keuangan Real-time

Penerapan sistem analitik keuangan real-time untuk monitoring arus kas, realisasi anggaran, dan proyeksi keuangan yang lebih akurat.



## Penguatan Kapasitas SDM

Program pengembangan kompetensi SDM perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan modern dan kepatuhan terhadap regulasi terkini.

### Profil Transformasi Perbendaharaan



### Fokus Area Transformasi



Kecepatan Proses



Akurasi Transaksi





# ARAH TRANSFORMASI ASPIRASI DAN PENGOLAHAN DATA

*"Integrating Data, Empowering Parliament"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Integrasi Data	Data aspirasi terfragmentasi dari berbagai saluran komunikasi	Mengembangkan sistem terintegrasi untuk pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data aspirasi	Peningkatan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat
Analitik Data	Analisis data aspirasi manual dan terbatas	Implementasi teknologi analitik data lanjutan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data aspirasi	Pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat
Partisipasi Publik	Mekanisme partisipasi publik terbatas dan kurang efektif	Mengembangkan mekanisme dan platform yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi	Penguatan hubungan antara DPRD dan konstituen
Digitalisasi Proses	Proses pengelolaan aspirasi manual dengan efisiensi rendah	Transformasi proses pengelolaan aspirasi dari manual menjadi digital	Peningkatan efisiensi, akurasi, dan responsivitas dalam pengelolaan aspirasi

# ARAH TRANSFORMASI ASPIRASI DAN PENGOLAHAN DATA

## "Integrating Data, Empowering Parliament"



### Integrasi Data Aspirasi

Mengembangkan sistem terintegrasi untuk pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data aspirasi masyarakat dari berbagai saluran komunikasi.



### Analitik Data Lanjutan

Implementasi teknologi analitik data lanjutan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan dari data aspirasi untuk mendukung pengambilan keputusan DPRD.



### Penguatan Partisipasi Publik

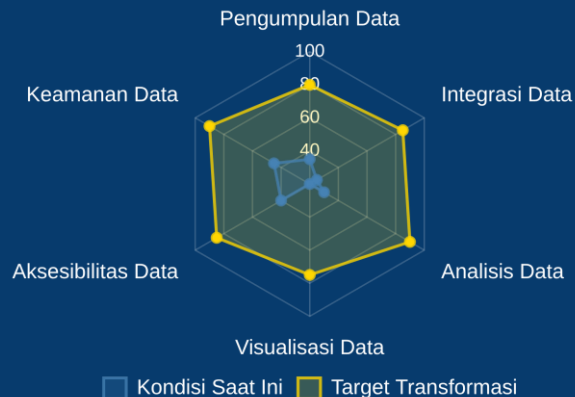
Mengembangkan mekanisme dan platform yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses legislasi.



### Digitalisasi Proses Aspirasi

Transformasi proses pengelolaan aspirasi dari manual menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan responsivitas.

### Profil Transformasi Pengelolaan Data Aspirasi



### Manfaat Transformasi



Peningkatan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat



Pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat



Penguatan hubungan antara DPRD dan konstituen



Peningkatan efektivitas fungsi representasi DPRD

# ARAH TRANSFORMASI PUBLIKASI DAN INFORMASI

*"Transforming Information into Strategic Communication, Building Lasting Public Trust"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Komunikasi Strategis	Pendekatan komunikasi reaktif dan terfragmentasi	Mengembangkan pendekatan komunikasi strategis yang terintegrasi dan proaktif	Peningkatan efektivitas penyampaian informasi dan kepercayaan publik
Kanal Digital	Pemanfaatan platform digital terbatas dengan jangkauan rendah	Optimalisasi platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi	Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan informasi DPRD kepada masyarakat
Analitik Komunikasi	Evaluasi dampak komunikasi belum sistematis dan berbasis data	Implementasi sistem analitik untuk mengukur efektivitas dan dampak strategi komunikasi	Pengambilan keputusan berbasis data untuk strategi komunikasi yang lebih efektif
Keterlibatan Publik	Mekanisme keterlibatan publik satu arah dan terbatas	Pengembangan mekanisme keterlibatan publik yang lebih interaktif dan inklusif	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan

# ARAH TRANSFORMASI PUBLIKASI DAN INFORMASI

*"Transforming Information into Strategic Communication, Building Lasting Public Trust"*



## Komunikasi Strategis

Mengembangkan pendekatan komunikasi strategis yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan membangun kepercayaan publik.



## Digitalisasi Kanal Publikasi

Optimalisasi platform digital dan media sosial untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas informasi DPRD kepada masyarakat.



## Analitik Dampak Komunikasi

Implementasi sistem analitik untuk mengukur efektivitas dan dampak strategi komunikasi serta publikasi DPRD secara berkelanjutan.



## Keterlibatan Publik

Pengembangan mekanisme keterlibatan publik yang lebih interaktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan.

### Profil Transformasi Komunikasi Strategis



### Kanal Komunikasi Strategis



Website Resmi



Media Sosial



Media Massa

# ARAH TRANSFORMASI PROTOKOL DAN PIMPINAN

*"From Formalities to Strategic Representation"*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Transformasi	Outcome
Representasi Strategis	Peran protokol terbatas pada aspek seremonial dan formalitas	Mengembangkan kapasitas protokol untuk mendukung peran representasi strategis pimpinan DPRD	Peningkatan efektivitas representasi pimpinan DPRD dalam konteks Jakarta sebagai Kota Global
Manajemen Agenda	Pengelolaan agenda pimpinan manual dengan koordinasi terbatas	Implementasi sistem manajemen agenda terintegrasi untuk mengoptimalkan efektivitas kegiatan pimpinan	Optimalisasi manajemen waktu dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan
Layanan Protokol	Standar layanan protokol belum terstandarisasi secara internasional	Peningkatan standar layanan protokol melalui pengembangan kompetensi staf dan penerapan SOP bertaraf internasional	Standar layanan protokol bertaraf internasional yang mendukung citra DPRD
Jejaring Protokoler	Jejaring protokoler terbatas dan belum dikelola secara sistematis	Membangun dan memperkuat jejaring protokoler dengan institusi pemerintah dan non-pemerintah	Penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan dan peningkatan efektivitas kegiatan pimpinan

# ARAH TRANSFORMASI PROTOKOL DAN PIMPINAN

## "From Formalities to Strategic Representation"



### Penguatan Representasi Strategis

Mengembangkan kapasitas protokol untuk mendukung peran representasi strategis pimpinan DPRD dalam konteks Jakarta sebagai Kota Global.



### Manajemen Agenda Terintegrasi

Implementasi sistem manajemen agenda terintegrasi untuk mengoptimalkan efektivitas kegiatan pimpinan dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan.



### Profesionalisasi Layanan Protokol

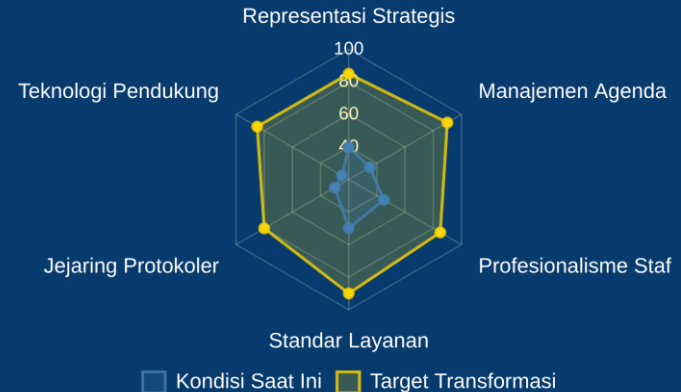
Peningkatan standar layanan protokol melalui pengembangan kompetensi staf dan penerapan standar operasional prosedur bertaraf internasional.



### Penguatan Jejaring Protokoler

Membangun dan memperkuat jejaring protokoler dengan institusi pemerintah dan non-pemerintah untuk mendukung efektivitas kegiatan pimpinan DPRD.

### Profil Transformasi Protokol dan Pimpinan



### Hasil yang Diharapkan



Peningkatan efektivitas representasi pimpinan DPRD



Optimalisasi manajemen waktu dan agenda pimpinan



**SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110